

**STUDI EKSPLORASI PEMANFAATAN DANA
PENGUATAN MODAL PADA SEKTOR KOPERASI
DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



**Disusun oleh:
Chandra Widyadewa
08404241012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI

**STUDI EKSPLORASI PEMANFAATAN DANA PENGUATAN MODAL
PADA SEKTOR KOPERASI
DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh:

Chandra Widyadewa

NIM. 08404241012

Telah disetujui Dosen Pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan di depan
TIM Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Juni 2015

Pembimbing



Mustofa, M.Sc.

NIP. 19800313 200604 1 001

PENGESAHAN

SKRIPSI

**STUDI EKSPLORASI PEMANFAATAN DANA PENGUATAN MODAL
PADA SEKTOR KOPERASI
DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh:
Chandra Widyadewa
NIM. 08404241012

Telah dipertahankan di depan TIM Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2015.

TIM Penguji

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Daru Wahyuni, M.Si.	Ketua Penguji		29 Juni 2015
Mustofa, M.Sc.	Sekretaris Penguji		26 Juni 2015
Supriyanto, M.M.	Penguji Utama		23 Juni 2015

Yogyakarta, 28 Juni 2015

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 0021

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chandra Widyadewa

NIM : 08404241012

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Judul Skripsi : Studi Eksplorasi Pemanfaatan Dana Penguatan Modal pada Sektor

Koperasi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian tertentu saya ambil sebagai acuan. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 17 Juni 2015

Penulis



Chandra Widyadewa

NIM. 08404241012

MOTTO

“It is never too late to be what you might have been.”

(George Eliot)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 5-8)

“Where there’s a will, there’s a way”

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur, karya tulis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ibu dan Bapak tercinta, yang senantiasa memanjatkan doa, motivasi serta memberikan kasih sayang yang tulus.
- ❖ Adik-adikku, Mega, Melin dan Nabila, yang selalu menemani dan memberi semangat.
- ❖ Devi, yang selalu memotivasi dan mendoakan yang terbaik.
- ❖ Teman-teman penyamun (Doni, Fandi, Alfi, Rhomi, Agus dan Bram) yang selalu mendukung dan mendoakan.
- ❖ Teman-teman di IMA (Bu Novi, Bu Sis, Bu Eka, Mbak Ana, Mas Erwan dan Mas Adit) yang telah memberikan semangat.

**STUDI EKSPLORASI PEMANFAATAN DANA PENGUATAN MODAL
PADA SEKTOR KOPERASI
DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh:

Chandra Widyadewa

NIM. 08404241012

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui kinerja koperasi penerima Dana Bantuan Modal (DPM). (2) Untuk mengetahui apakah DPM bermanfaat bagi koperasi penerima DPM. (3) Untuk mengetahui sejauh mana manfaat DPM bagi koperasi penerima DPM. (4) Untuk mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi koperasi penerima DPM.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan data primer dari angket dan dilengkapi data sekunder berupa data karakteristik Kabupaten Sleman, data penyaluran DPM dan data 40 koperasi penerima bantuan DPM dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa koperasi penerima DPM didominasi oleh koperasi simpan pinjam yang dilihat dari kinerjanya merupakan koperasi berskala kecil dan menengah, diketahui juga bahwa koperasi penerima DPM merasakan manfaat kemajuan usaha koperasi. Manfaat yang dirasakan tercermin dari peningkatan volume usaha sebesar 48,41%, peningkatan tenaga kerja sebesar 9,26%, peningkatan jumlah anggota sebesar 15,01%, peningkatan SHU sebesar 77,01%, peningkatan nilai asset sebesar 43,79%, serta peningkatan modal sebesar 39,30%. Secara keseluruhan dapat ditarik rata-rata perkembangan usaha koperasi penerima DPM adalah sebesar 38,80%. Disamping manfaat yang dirasakan, ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi penerima DPM. Pertama, kendala dan masalah internal berupa ketidakmampuan koperasi dalam menyalurkan DPM dan ketidakmampuan koperasi dalam mengenali karakter anggota. Kedua, kendala dan masalah eksternal berupa prosedur pengajuan DPM yang berbeli-belit, jumlah pinjaman yang terlalu kecil, dan besaran kontribusi yang dirasa memberatkan.

Kata kunci: Koperasi, Dana Penguatan Modal

**AN EXPLORATORY STUDY OF THE CAPITAL STRENGTHENING
FUND PROGRAM ON COOPERATIVE SECTOR
IN SLEMAN REGENCY SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA**

ABSTRACT

This study aimed (1) to determine the performance of cooperatives that receive Capital Strengthening Fund (CSF). (2) To determine whether the beneficial CSF for cooperatives that receive CSF. (3) To determine the extent of the benefits for the cooperative that receive CSF. (4) To identify problems and constraints faced by the cooperative that receive CSF.

This research is a descriptive study, using primary data from questionnaires and secondary data include characteristics of Sleman Regency, the CSF distribution data and 40 cooperative data who receives CSF from the local government of Sleman Regency.

The results of the study found that the CSF recipient cooperatives dominated by saving and loan cooperative and seen from their performance are small and medium-scale cooperatives, known also that those receiving CSF get benefits in the form of business improvement. The benefits are reflected in the business volume improvement by 48.41%, a workforce increase amounting to 9.26%, an increasing number of members amounted to 15.01%, an SHU (part of business profits given to the member) increase amounting to 77.01%, increase asset value amounted to 43.79%, and capital increase amounting to 39.30%. On the whole, the average improvement that those receiving CSF are 38.80%. Besides the perceived benefits, there are several problems and constraints faced by the CSF recipient cooperatives. First, internal problems and constraints such as the cooperative inability to distribute CSF and cooperative inability to recognize the character of members. Second, external problems and constraints such as the difficulties in CSF application procedure, the CSF amount is too small, and the amount of the contribution is considered burdensome.

Keywords: Cooperative, Capital Strengthening Fund

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Studi Eksplorasi Pemanfaatan Dana Penguatan Modal pada Sektor Koperasi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati sebagai ungkapan rasa syukur atas segala bantuan yang diberikan, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah menyediakan sarana dan fasilitas perkuliahan yang baik.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis menggunakan fasilitas selama kuliah sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Daru Wahyuni, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi dengan penyusunan tugas akhir skripsi ini.
4. Bapak Tejo Nurseto, M.Pd., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahannya di bidang akademik.

5. Bapak Mustofa, M.Sc., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Semua dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti selama penulis kuliah sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu, Bapak, dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, pengertian, dorongan dan pengorbanan yang tak terkira.
8. Teman-teman pendidikan ekonomi angkatan 2008 yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 18 Juni 2015

Penulis



Chandra Widyadewa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II. KAJIAN TEORI	14
A. Deskripsi Teori.....	14
1. Pembangunan Ekonomi	14
2. Koperasi	14
3. Pemberdayaan Masyarakat	23

4. Investasi	23
5. Modal	24
6. Pinjaman (Kredit).....	27
7. Dana Bergulir.....	27
8. Dana Penguatan Modal	28
9. Teori Efektivitas.....	31
B. Penelitian yang Relevan.....	33
C. Kerangka Berpikir.....	36
BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Desain Penelitian	38
B. Definisi Operasional Variabel.....	39
C. Tempat dan Waktu Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Instrumen Penelitian	41
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian	87
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan Penelitian	93
B. Keterbatasan Penelitian.....	94
C. Saran Penelitian	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keadaan Koperasi di Indonesia Tahun 2010-2013	2
2. Keadaan Koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2013	4
3. Data Penyaluran, Pengembalian dan Piutang Pokok Dana Penguatan Modal di Kabupaten Sleman sampai dengan 31 Desember 2013	8
4. Alternatif Jawaban dan Skor Angket	42
5. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	43
6. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman	48
7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman	49
8. Perkembangan Koperasi Tahun 2010-2013 di Kabupaten Sleman	50
9. Data Penyaluran, Pengembalian dan Piutang Pokok Dana Penguatan Modal di Kabupaten Sleman sampai dengan 31 Desember 2013	56
10. Pengalokasian Penggunaan DPM	66
11. Perubahan dan Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Penerima DPM.....	74
12. Perubahan dan Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Koperasi Penerima DPM	76
13. Perubahan dan Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Penerima DPM	77
14. Perubahan dan Pertumbuhan SHU Koperasi Penerima DPM	79
15. Perubahan dan Pertumbuhan Nilai Asset Koperasi Penerima DPM.....	80

16. Perubahan dan Pertumbuhan Modal Koperasi Penerima DPM	82
17. Perubahan dan Pertumbuhan Koperasi Penerima DPM	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	37
2. Bidang Usaha Koperasi.....	57
3. Lama Usaha Koperasi	58
4. Jumlah Anggota Koperasi.....	59
5. Nilai Asset Koperasi	60
6. SHU Koperasi	61
7. Modal Koperasi.....	63
8. Persepsi Ketercukupan Jumlah Pinjaman DPM.....	64
9. Penyelewengan Penggunaan DPM	67
10. Persepsi Manfaat DPM dalam Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi	68
11. Persepsi Responden tentang Kesulitan Usaha Tanpa Adanya DPM	69
12. Persepsi Manfaat DPM dalam Perkembangan Usaha Koperasi	70
13. Persepsi Manfaat DPM dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi	71
14. Persepsi Manfaat DPM untuk Koperasi.....	72
15. Volume Usaha Koperasi Sebelum dan Sesudah Menerima DPM	73
16. Jumlah Tenaga Kerja Koperasi Sebelum dan Sesudah Menerima DPM..	75
17. Jumlah Anggota Koperasi Sebelum dan Sesudah Menerima DPM.....	77
18. SHU Koperasi Sebelum dan Sesudah Menerima DPM	78

19. Nilai Asset Koperasi Sebelum dan Sesudah Menerima DPM	80
20. Modal Koperasi Sebelum dan Sesudah Menerima DPM.....	81
21. Persepsi Responden terhadap Proses Pengajuan DPM	84
22. Persepsi Responden terhadap Ketercukupan Jumlah Pinjaman DPM yang Diterima	85
23. Persepsi Responden terhadap Kontribusi DPM	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar responden	100
2. Instrumen penelitian.....	102
3. Hasil penelitian	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi bermula pada abad ke-20, merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Konsep koperasi yang pertama kali muncul di negara barat ini lalu dibawa masuk ke Indonesia pada tahun 1896 oleh seorang pamong praja bernama Patih R.Aria Wiria Atmaja sampai pada akhirnya berkembang di Indonesia sampai sekarang ini.

Koperasi di Indonesia berperan strategis dalam menggerakkan denyut nadi perekonomian masyarakat serta pembangunan nasional. Koperasi yang berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional, hal ini tercantum pada penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Peran dan fungsi koperasi tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi semangat kolektif, kebersamaan, dan prinsip keadilan yang berakar pada masyarakat kita, yaitu gotong royong. Selain itu, model bisnis koperasi merupakan

manifestasi konstitusi, yakni UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi, khususnya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Keadaan koperasi di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Keadaan Koperasi di Indonesia Tahun 2010-2013

Keterangan	Tahun			
	2010	2011*	2012*	2013*
Jumlah Koperasi (Unit)	177.482	188.181	194.295	203.701
- Aktif (Unit)	124.855	133.666	139.321	143.117
- Tidak Aktif (Unit)	52.627	54.515	54.974	60.584
Jumlah Anggota (Orang)	30.461.121	30.849.913	33.869.439	35.258.176
Jumlah Modal (Rp. Juta)	64.788.726,57	75.484.237,15	102.826.158,27	170.376.863,09
- Modal Sendiri (Rp. Juta)	30.102.013,90	35.794.284,64	51.422.621,07	89.536.290,61
- Modal Luar (Rp. Juta)	34.686.712,67	39.689.952,51	51.403.537,20	80.840.572,48
Volume Usaha (Rp. Juta)	76.822.082,40	95.062.402,21	119.182.690,08	125.584.976,19

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (data diolah)

*Angka sangat sementara

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia setiap tahun semakin berkembang. Jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 177.482 unit naik menjadi 203.701 unit pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terjadi kenaikan jumlah koperasi sebesar 14,7% dibandingkan tahun 2010. Kenaikan jumlah koperasi juga dibarengi dengan kenaikan jumlah anggota dari yang tadinya berjumlah 30.461.121 orang di tahun 2010 menjadi 35.258.176 orang di tahun 2013. Dari segi jumlah modal dan volume usaha juga menunjukkan peningkatan. Yang perlu diwaspadai adalah masih besarnya jumlah koperasi yang tidak aktif dan bahkan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah koperasi tidak aktif adalah sejumlah 60.584 unit atau sebesar 29,7% dari keseluruhan jumlah koperasi. Jumlah koperasi tidak aktif di tahun 2013 itu meningkat sebesar 15,1% dibandingkan tahun 2010. Dapat dilihat peningkatan jumlah koperasi dari tahun 2010-2013 adalah sebesar 14,7%, sedangkan peningkatan jumlah koperasi tidak aktif dari tahun 2010-2013 adalah sebesar 15,1%, ternyata masih lebih besar peningkatan jumlah koperasi tidak aktif, ini harus diwaspadai.

Jumlah koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 adalah sejumlah 2.729 unit atau sebesar 1,3% dari keseluruhan jumlah koperasi di Indonesia. Keadaan koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sama dengan keadaan koperasi seluruh Indonesia. Hal ini disajikan oleh tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Keadaan Koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2013

Keterangan	Tahun			
	2010	2011*	2012*	2013*
Jumlah Koperasi (Unit)	2.410	2.410	2.506	2.729
- Aktif (Unit)	1.926	1.926	2.061	2.172
- Tidak Aktif (Unit)	484	484	445	557
Jumlah Anggota (Orang)	782.982	688.326	707.811	712.666
Jumlah Modal (Rp. Juta)	737.135,91	1.628.112,99	1.462.169,00	2.013.107,00
- Modal Sendiri (Rp. Juta)	364.298,03	492.622,99	930.458,00	1.440.948,00
- Modal Luar (Rp. Juta)	372.837,88	1.135.490,00	531.711,00	572.159,00
Volume Usaha (Rp. Juta)	2.376.468,33	2.296.146,00	2.304.127,00	2.304.285,00

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (data diolah)

*Angka sangat sementara

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah koperasi dan jumlah modal pada koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2010 sampai tahun 2013 mengalami kecenderungan meningkat seperti yang terjadi pada koperasi di seluruh Indonesia. Jumlah Koperasi di DIY pada tahun 2010 adalah sebesar 2.410 unit, meningkat menjadi sebesar 2.729 unit pada tahun 2013, atau meningkat sebesar 13,2%. Sedangkan, jumlah anggota dan volume usaha koperasi di DIY mengalami kecenderungan menurun. Jumlah anggota koperasi di DIY pada tahun 2010 adalah sebesar 782.982 orang, menurun menjadi 712.666 orang pada tahun 2013, atau menurun sebesar 9%. Sama halnya dengan jumlah anggota, volume usaha pun juga mengalami kecenderungan menurun. Yang menarik adalah adanya perubahan struktur modal pada koperasi di DIY. Pada tahun 2010, modal koperasi di DIY masih

didominasi oleh modal luar, sedangkan pada tahun 2013 didominasi oleh modal sendiri.

Koperasi di Kabupaten Sleman juga terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman, jumlah koperasi di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 berjumlah 587, lalu naik menjadi 601 pada tahun 2009, sempat turun jumlahnya pada tahun 2010 menjadi 598, lalu naik lagi menjadi 604 pada tahun 2011, dan sampai pada tahun 2012 sudah berjumlah 617 koperasi dengan jumlah anggota koperasi mencapai 240.522 orang. Jumlah koperasi dan anggota sedemikian itu bukanlah jumlah yang kecil, bahkan koperasi di Kabupaten Sleman memiliki potensi yang cukup besar, selain jumlah koperasinya merupakan terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta, 89,56 persen diantaranya merupakan koperasi yang aktif.

Dalam perkembangannya, koperasi di Indonesia mengalami pasang surut. Berbagai kendala yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia berperan dalam pasang surut tersebut. Asisten Deputi Urusan Asuransi dan Jasa Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM, Toto Sugiyono, melalui Bisnis Indonesia (2013) mengatakan bahwa yang menjadi penghalang koperasi menjadi bisnis skala besar adalah pada kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan prinsip koperasi, dan sistem administrasi dan bisnis yang masih rendah. Untuk mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip dalam koperasi, pemerintah mendorong upaya intensif dan terpadu dengan klasifikasi koperasi. Pengklasifikasian koperasi didasarkan Permen No.

22/Per/M.KUKM/IV/2007 menetapkan peringkat klasifikasi dari klasifikasi A (sangat baik), B (baik), C (cukup baik), D (kurang baik), yang selanjutnya dijabarkan menjadi koperasi berperingkat sangat berkualitas, berkualitas, dan cukup berkualitas.

Kendala lainnya dalam perkembangan koperasi adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan. Kim dalam Saudin (2008) mengatakan bahwa intervensi untuk memutus rantai permasalahan ini dapat saja dilakukan jika ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat melalui pemberian pinjaman modal. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk melaksanakan perkuatan di bidang permodalan.

Pada bagian latar belakang sebelumnya disebutkan bahwa koperasi di Sleman mempunyai potensi yang cukup besar. Potensi ini menyimpan beberapa kendala, diantaranya adalah ketersediaan modal. Dalam survei awal yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati beberapa koperasi di Kabupaten Sleman, ada beberapa koperasi terutama yang berbentuk koperasi simpan pinjam dan merupakan koperasi karyawan atau pegawai negeri mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal. Modal yang ada, terutama berupa modal sendiri tidak mampu mengimbangi besarnya volume usaha simpan pinjam yang mereka jalankan. Padahal potensi untuk mengembangkan usaha masih sangat besar, hanya saja terkendala dengan modal yang ada. Peningkatan modal pada koperasi tentu saja akan meningkatkan usaha koperasi itu sendiri. Selain itu peningkatan

modal dan usaha pada sektor koperasi juga akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sleman karena anggota koperasi di Kabupaten Sleman juga kebanyakan merupakan warga di Kabupaten Sleman.

Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam perda nomor 13 tahun 2009 tentang dana penguatan modal sebagaimana telah diubah dengan perda nomor 1 tahun 2013 mengeluarkan program dana penguatan modal. Dana penguatan modal yaitu dana bergulir yang disediakan kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil dan menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang diperuntukan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya. Maksud dan tujuan pemberian dana bantuan modal ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menciptakan peluang usaha masyarakat guna peningkatan pendapatan masyarakat.

Adanya dukungan dari pemerintah daerah patut disyukuri dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya karena tidak semua kabupaten atau kota dapat mendukung kegiatan permodalan dari APBD, dan Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan ini dalam setiap tahunnya, bahkan selalu mengalami peningkatan. Akumulasi dana penguatan modal yang telah disalurkan kepada masyarakat sejak dicanangkan hingga 31 Desember 2013 mencapai Rp181.476.678.050. Berikut ini disajikan tabel data penyaluran, pengembalian dan piutang pokok dana penguatan modal sampai dengan 31 Desember 2013.

Tabel 3. Data Penyaluran, Pengembalian dan Piutang Pokok Dana Penguatan Modal di Kabupaten Sleman sampai dengan 31 Desember 2013

No.	Uraian	Penyaluran (Rp Ribu)	Pengembalian (Rp Ribu)	%	Piutang (Rp Ribu)	%
I.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	126.166.928,05	106.050.455,15	84,06	20.116.472,90	15,94
II.	Dinas Perindagkop.	36.034.000,00	26.943.696,50	74,77	9.090.303,50	25,23
1	Perindustrian (APBD)	8.938.000,00	6.513.032,60	72,87	2.424.967,40	27,13
2	Perindustrian (APBN)	714.000,00	560.675,40	78,53	153.324,60	21,47
3	Koperasi dan UKM	26.382.000,00	19.869.988,50	75,32	6.512.011,50	24,68
III.	Dinas Nakersos	8.448.750,00	5.813.465,32	68,81	2.635.284,68	31,19
IV.	Badan KB, PM & PP	6.525.000,00	3.927.122,55	60,19	2.597.877,45	39,81
V.	Dinas Budpar	2.655.000,00	1.361.500,00	51,28	1.293.500,00	48,72
VI.	Dinas Pasar	1.647.000,00	540.752,50	32,83	1.106.247,50	67,17
	Jumlah	181.476.678,05	171.580.688,52	94,55	9.895.989,53	5,45

Sumber: Laporan DPM Kabupaten Sleman semester II tahun 2013 (data diolah)

Dari tabel 3 di atas terlihat bahwa dana penguatan modal didistribusikan ke badan-badan terkait, meliputi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; Dinas Tenaga Kerja dan Sosial; Badan KB, PM, dan PP; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; serta Dinas Pasar. Melalui badan-badan itulah dana penguatan modal kemudian didistribusikan kepada penerima dana penguatan modal. Melalui tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa akumulasi penyaluran dana penguatan modal ke koperasi dan UKM sampai dengan 31 Desember 2013

adalah sebesar Rp26.382.000.000 atau sebesar 14,5% dari keseluruhan dana penguatan modal yang disalurkan. 75,32% dari dana penguatan modal yang disalurkan ke koperasi dan UKM tersebut telah dikembalikan, sedangkan 24,68% masih menjadi piutang.

Dana penguatan modal bukanlah dana hibah, dalam pengembalian dana penguatan modal tersebut dikenakan tambahan kontribusi. Dengan besar kontribusi yang sangat murah yaitu sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan diharapkan akan memberikan manfaat yang besar kepada perkembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Sleman. Namun apakah benar pemberian dana penguatan modal efektif dan memberikan manfaat serta seberapa besar manfaat tersebut, hal itu diperlukan penelitian lebih lanjut terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memilih judul “Studi Eksplorasi Pemanfaatan Dana Penguatan Modal pada Sektor Koperasi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan prinsip koperasi, sistem administrasi dan bisnis yang masih rendah merupakan penghalang bagi perkembangan koperasi
2. Perkembangan koperasi juga terkendala dari terbatasnya modal sendiri.

3. Sulitnya mengakses sumber permodalan juga ikut andil dalam terhambatnya perkembangan koperasi.
4. Kurangnya komitmen pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan modal kepada koperasi di Indonesia.
5. Program pemerintah Kabupaten Sleman dalam bentuk dana penguatan modal sebagai wujud komitmen pemerintah untuk membantu koperasi belum diketahui seberapa besar manfaatnya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Pembatasan masalah bermaksud untuk menyederhanakan penelitian, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga. Maka penelitian ini akan difokuskan pada studi eksplorasi kemanfaatan dana penguatan modal bagi koperasi penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman yang masih memiliki tanggungan kewajiban dana penguatan modal dan memiliki jatuh tempo kewajiban tersebut dari tahun 2014 ke atas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana potret kinerja koperasi penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman?

2. Apakah penyaluran program dana penguatan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman bermanfaat atau tidak bagi koperasi penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman?
3. Sejauh mana manfaat program dana penguatan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman bagi koperasi penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman?
4. Apa saja permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh koperasi penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman dalam rangka mengakses dana penguatan modal?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potret kinerja koperasi penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui apakah penyaluran program dana penguatan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman bermanfaat atau tidak bagi koperasi penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui sejauh mana manfaat program dana penguatan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman bagi koperasi penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman.

4. Untuk mengidentifikasi apa saja permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh koperasi penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman dalam rangka mengakses dana penguatan modal.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang studi mengenai manfaat dana penguatan modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam pembuatan kebijakan mengenai pemberian dana penguatan modal.

- b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi pembaca berkaitan dengan manfaat dana penguatan modal di Kabupaten Sleman.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan pemahaman lebih dalam tentang manfaat dana penguatan modal di Kabupaten Sleman.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu indikator dari kemajuan dan kesejahteraan suatu negara dimata negara lain.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat pendapatan perkapita dari sebuah negara. Menurut Sadono Sukirno (2011: 423), pembangunan ekonomi bukan hanya mengenai perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga mencakup modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan masalah pemerataan pembagian pendapatan.

2. Koperasi

a. Definisi Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja

bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Menurut Hatta dalam Revrison Baswir (2000: 2), koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Menurut ILO dalam Revrison Baswir (2000: 2), Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Chainago dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001: 17) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-perorang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

- 1) Koperasi merupakan badan usaha.
- 2) Koperasi dapat didirikan oleh orang-seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
- 3) Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat.
- 4) Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.
- 5) Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi.

Koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi penopang perekonomian. Sri-Edi Swasono dalam Hendar & Kusnadi (2005: 19) menjelaskan alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu:

- 1) Koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.
- 2) Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya

bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotongroyong dan kolektivitas akan tumbuh subur di dalam koperasi.

- 3) Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah partial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 4) Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain maupun bangun usaha Negara (perusahaan Negara), serta di dalam instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan.
- 5) Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

b. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah.

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Fungsi dan Peran Koperasi

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi dan koperasi adalah sebagai berikut.

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

d. Prinsip Koperasi

Karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianut. Prinsip-prinsip

pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya.

Sejarah prinsip koperasi dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale atau *the principles of Rochdale* adalah sebagai berikut:

- 1) Barang-barang dijual bukan barang palsu dan dengan timbangan yang benar.
- 2) Penjualan barang dengan tunai.
- 3) Harga penjualan menurut harga pasar.
- 4) Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut perimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota ke koperasi.
- 5) Masing-masing anggota mempunyai satu suara.
- 6) Netral dalam politik dan keagamaan.

Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan oleh koperasi di banyak Negara sebagai prinsip-prinsip pendiriannya. Namun di dalam perkembangannya kemudian, ditambahkan beberapa prinsip lain seperti:

- 7) Adanya pembatasan bunga atas modal.
- 8) Keanggotaan bersifat sukarela.
- 9) Semua anggota menyumbang dalam permodalan (saling tolong untuk mencapai penyelamatan secara mandiri).

Pada tahun 1966, dalam kongres Gabungan Koperasi Internasional (*International Corporative Alliance/ICA*) di Austria, dirumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis.
- 3) Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya.
- 4) Sisa hasil usaha, jika ada yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota.

- 5) Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya.
- 6) Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat lokal, pada tingkat provinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi di seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerjasama antar koperasi, baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Pendidikan perkoperasian.
- 2) Kerja sama antarkoperasi.

e. Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Jenis koperasi sangat beragam tergantung dari

latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuan tersebut penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan. Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota.

Dalam pasal 16 UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tersebut diuraikan jenis koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi konsumen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
- 2) Koperasi produsen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
- 3) Koperasi jasa, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
- 4) Koperasi Simpan Pinjam, menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

f. Permodalan Koperasi

Sesuai dengan pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari:

- 1) Simpanan pokok.
- 2) Simpanan wajib.
- 3) Dana cadangan.
- 4) Hibah.

Modal pinjaman dapat berasal dari:

- 1) Anggota.
- 2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya.
- 3) Bank dan lembaga.
- 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
- 5) Sumber lain yang sah.

g. Pemeringkatan Koperasi

Pemeringkatan koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.

Tujuan pemeringkatan koperasi menurut pasal 2 Permeneg KUKM RI No. 22/PER/M.KUKM/IV/2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu.
- 2) Menetapkan peringkat kualifikasi koperasi.
- 3) Mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat sejahtera (Sumodiningrat, 2009: 60). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, dengan mengembangkan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang diupayakan salah satunya dengan membentuk atau bergabung ke dalam koperasi.

Dengan adanya koperasi, anggota dapat saling mendukung, bekerja sama dan menjadi mandiri terutama dalam hal ekonomi. Potensi yang dimiliki oleh masing-masing koperasi dikembangkan dengan dukungan pemerintah terutama dalam hal finansial, yakni permodalan.

4. Investasi

Menurut Sadono Sukirno (2011: 121), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam modal atau pengusaha untuk membeli

barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa.

Sumber dana yang umumnya digunakan untuk investasi adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan atau investasi pribadi. Sumber dana satu ini harusnya mudah diperoleh, akan tetapi seringkali keinginan dan semangat untuk berinvestasi tak disertai dengan keberadaan dana pribadi yang memadai atau bahkan tidak ada sama sekali.
- b. Pinjaman (kredit). Sumber dana berupa pinjaman dapat berasal dari bank, pegadaian, maupun dari fasilitas pembiayaan dari instansi pemerintah atau BUMN.
- c. Kemitraan. Untuk mendapatkan dana dari sumber ini diperlukan adanya pemilik modal yang memiliki uang dan seseorang yang memiliki ide usaha. Seseorang yang memiliki ide usaha namun tidak memiliki cukup modal untuk mewujudkannya bisa mencari orang yang memiliki modal baik dari orang terdekat maupun orang yang tidak dikenalnya sama sekali, yang mau membiayai ide usahanya tersebut.

5. Modal

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap usaha atau perusahaan membutuhkan dana atau biaya untuk dapat beroperasi. Hal ini sebenarnya menjadi persoalan yang dihadapi hampir semua pengusaha, karena untuk

memulai usaha dibutuhkan pengeluaran sejumlah uang sebagai modal awal. Pengeluaran tersebut untuk membeli bahan baku dan penolong, alat-alat dan fasilitas produksi serta pengeluaran operasional lainnya. Melalui barang-barang yang dibeli tersebut perusahaan dapat menghasilkan sejumlah output yang kemudian dapat dijualnya untuk mendapat sejumlah uang pengembalian modal dan keuntungan. Bagian keuntungan ini sebagian digunakan untuk memperbesar modal agar menghasilkan uang sebagai keuntungan dalam jumlah yang lebih besar lagi, dan seterusnya begitu sampai pengusaha mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan atau target (Achmad dalam Afifah, 2012: 27).

Tulus (dalam Afifah, 2012: 27) menjelaskan bahwa modal adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar. Faktor produksi berupa modal tersebut akan membawa arah perusahaan, apakah akan menuju perkembangan yang lebih baik atau malah membawa ke arah kemerosotan.

Sedangkan Neti (dalam Afifah, 2012: 28) menyebutkan bahwa dalam memulai suatu usaha, modal merupakan salah satu faktor penting disamping faktor lainnya, sehingga suatu usaha bisa tidak berjalan apabila tidak tersedia modal. Artinya, bahwa suatu usaha tidak akan pernah ada atau tidak dapat berjalan tanpa adanya modal. Hal ini menggambarkan bahwa modal menjadi faktor utama dan penentu dari suatu kegiatan usaha. Karenanya setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha,

maka langkah utama yang dilakukannya adalah memikirkan dan mencari modal untuk usahanya.

Menurut Prawirosentono (dalam Afifah, 2012: 28) modal merupakan, kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang dan dinyatakan dalam nilai uang. Modal dalam bentuk uang pada suatu usaha mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan usaha, yakni: (1) sebagian dibelikan tanah dan bangunan; (2) sebagian dibelikan persediaan bahan; (3) sebagian dibelikan mesin dan peralatan; dan (4) sebagian lagi disimpan dalam bentuk uang tunai.

Selain sebagai bagian terpenting di dalam proses produksi, modal juga merupakan faktor utama dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam pengembangan perusahaan. Hal ini dicapai melalui peningkatan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan atau laba bagi pengusaha (Achmad dalam Afifah, 2012: 28).

Dengan tersedianya modal maka usaha akan berjalan lancar sehingga akan mengembangkan modal itu sendiri melalui suatu proses kegiatan usaha. Modal yang digunakan dapat merupakan modal sendiri seluruhnya atau merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Kumpulan berbagai sumber modal akan membentuk suatu kekuatan modal yang ditanamkan guna menjalankan usaha. Modal yang dimiliki tersebut jika dikelola secara optimal maka akan meningkatkan volume penjualan (Riyanto dalam Afifah, 2012: 29).

6. Pinjaman (Kredit)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pinjaman atau sering juga disebut dengan kredit adalah mempergunakan uang yang bukan milik sendiri (bisa berasal dari individu ataupun bank dan lembaga lainnya) dengan kesepakatan yang mengharuskan untuk dikembalikan di waktu yang akan datang. Pinjaman yang berasal dari bank atau lembaga lainnya biasanya mensyaratkan adanya bunga, imbalan atau jasa, atau bagi hasil dari keuntungan saat mengembalikan pinjaman.

7. Dana Bergulir

Dana bergulir menurut Buletin Teknis Akuntansi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Berputar atau bergulir menurut Suprpto (1999: 23) mengandung dua makna yaitu:

- a. Dana tersebut harus selalu berputar (tidak berhenti) dalam aktivitas individu atau kelompok yang dapat memanfaatkan melalui kegiatan yang bersifat produktif.
- b. Pengertian yang lebih luas dana tersebut harus selalu berputar untuk dapat dimanfaatkan secara bergulir dari individu atau kelompok yang lain.

Adapun karakteristik dari dana bergulir menurut Buletin Teknis Akuntansi Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.
- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
- e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

8. Dana Penguatan Modal

Menurut pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sleman No.13 tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal, definisi dana penguatan

modal adalah dana bergulir yang disediakan kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil dan menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang diperuntukkan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya.

Maksud dan tujuan penyaluran dana penguatan modal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menciptakan peluang usaha masyarakat guna peningkatan pendapatan masyarakat.

Sumber dana penguatan modal ialah:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- d. Pengembalian angsuran pokok dana penguatan Modal.

Sasaran pemberian dana penguatan modal adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi.
- b. Kelompok tani, termasuk kelompok lumbung pangan dan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM).
- c. Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- d. Koperasi.
- e. Usaha Kecil dan Menengah (UKM), termasuk kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), kelompok PKK

Padukuhan, kelompok Kegiatan Perlindungan Anak (kelompok PAUD dan kelompok Pendukung ASI), pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL).

Penerima pinjaman DPM memiliki jangka waktu pengembalian dana penguatan modal paling lama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan masa tenggang (*grace period*) 4 (empat) bulan. Masa tenggang (*grace period*) adalah masa pada awal periode angsuran dimana penerima dana penguatan modal tidak membayar angsuran pokok tetapi diwajibkan membayar kontribusi.

Kontribusi adalah imbal jasa atas pemanfaatan dana penguatan modal. Penerima dana penguatan modal wajib memberikan kontribusi sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total dana penguatan modal yang diterimanya selama jangka waktu pemberian dana penguatan modal. Selama masa tenggang (*grace period*) penerima dana penguatan modal hanya wajib membayar kontribusi.

Untuk dapat menerima pinjaman DPM ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh individu maupun kelompok calon penerima, yaitu:

a. Kriteria umum

- 1) Memiliki kegiatan usaha dan beroperasi secara nyata dalam masyarakat.
- 2) Tidak sedang menerima dana dari program sejenis.
- 3) Mempunyai perencanaan yang terarah dalam hal pemanfaatan dana penguatan modal.

b. Kriteria khusus

Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan: kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), kelompok PKK Padukuhan dan kelompok Kegiatan Perlindungan Anak (kelompok PAUD dan kelompok Pendukung ASI) yang memiliki kegiatan usaha aktif dan dinamis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

9. Teori Efektivitas

Efektivitas berkaitan erat dengan dengan keberhasilan atau ketercapaian oleh suatu program. Mengukur efektivitas berarti mengukur seberapa jauh tujuan yang direncanakan dapat tercapai. “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005: 92).

Mengukur tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara perencanaan (tujuan) dan hasil yang diwujudkan atau pelaksanaan. Jika perencanaan atau tujuan bisa dicapai maka itu dapat dikatakan efektif. Namun, jika hasil yang diwujudkan atau pelaksanaannya tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai yang diharapkan, maka hal tersebut dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, oleh S.P. Siagian (1978: 77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para *implementer* tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

B. Penelitian yang Relevan

1. Tesis yang disusun oleh Mohamad Anugrah Hamonangan pada tahun 2010 yang berjudul “Kajian Partisipasi Penerima Manfaat Dana Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang” dengan hasil penelitian:
 - a. Pelaksanaan tahap kegiatan pencairan dana bergulir sudah sesuai dengan pedoman umum maupun pedoman khusus P2KP.
 - b. Peran masyarakat penerima manfaat dana bergulir sebagai bentuk partisipasi masyarakat menempatkan partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Tawang Mas terhadap pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP berada pada tingkatan *delegated power*, dimana partisipasi mendapat tempat dan apresiasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk dukungan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah maupun

evaluasi program dan kelompok masyarakat merasa bahwa ide awal pembentukan KSM adalah merupakan ide masyarakat sendiri, pengelolaan program ada pada masyarakat sendiri, adanya limpahan kewenangan pada masyarakat untuk membuat keputusan dan peran pemerintah dalam pemecahan masalah adalah dengan tanpa paksaan.

- c. Bahwa penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif dan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
2. Jurnal yang ditulis oleh Yetti Oktarina pada tahun 2009 dengan judul “Dampak Dana Penguatan Modal untuk Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Padi Sawah di Desa Gunung Kuripan Kec. Pengandonan Kabupaten OKU” dengan hasil penelitian:
 - a. Dengan adanya penyaluran Dana Penguatan Modal bagi Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) tampak bahwa ada pengaruh terhadap kestabilan harga jual gabah dan beras di tingkat petani, walaupun tidak 100%.
 - b. Tingkat pendapatan petani mitra DPM-LUEP meningkat, karena harga penjualan gabah dan berasnya lebih tinggi bila dibandingkan harga jual gabah dan beras di pasaran umum yang diperoleh petani bukan mitra DPM-LUEP.
 3. Jurnal yang ditulis oleh Rifda Zahra Afifah dan Achma Hendra Setiawan pada tahun 2012 dengan judul “Analisis Bantuan Modal dan Kredit bagi

Kelompok Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (Studi Kasus: KPUM di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah) dengan hasil penelitian:

- a. Kredit yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dapat membantu meningkatkan modal usaha, omzet penjualan, dan laba para pelaku usaha mikro di Kelurahan Pekunden yang dilihat dari perbedaan variabel modal usaha, omzet penjualan, dan laba antara sebelum dan setelah mendapat kredit yaitu modal usaha terdapat kenaikan sebesar 55,87%, omzet penjualan terdapat kenaikan sebesar 22,22%, dan kenaikan laba sebesar 44,12%.
 - b. Bantuan modal dalam bentuk barang dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang diberikan kepada kelompok pelaku usaha mikro di Kelurahan Pekunden antara lain kompor gas, wajan, dan waskom, mesin jahit, etalase, blender, tong, dan panci. Bantuan modal yang paling banyak diterima para pelaku usaha mikro yaitu kompor gas, wajan, dan waskom sebanyak 66,6% atau 32 responden dari total keseluruhan responden sebanyak 48 responden.
4. Skripsi yang disusun oleh Priyo Harsono pada tahun 2010 dengan judul “Analisis Bantuan Kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terhadap Perkembangan UMK Binaan KUB Rukun Mina Barokah di Kecamatan Juwana” dengan hasil penelitian ada peningkatan secara signifikan pada variabel modal usaha, tenaga kerja, jumlah pembeli, total

penjualan, dan keuntungan sesudah mendapatkan bantuan kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

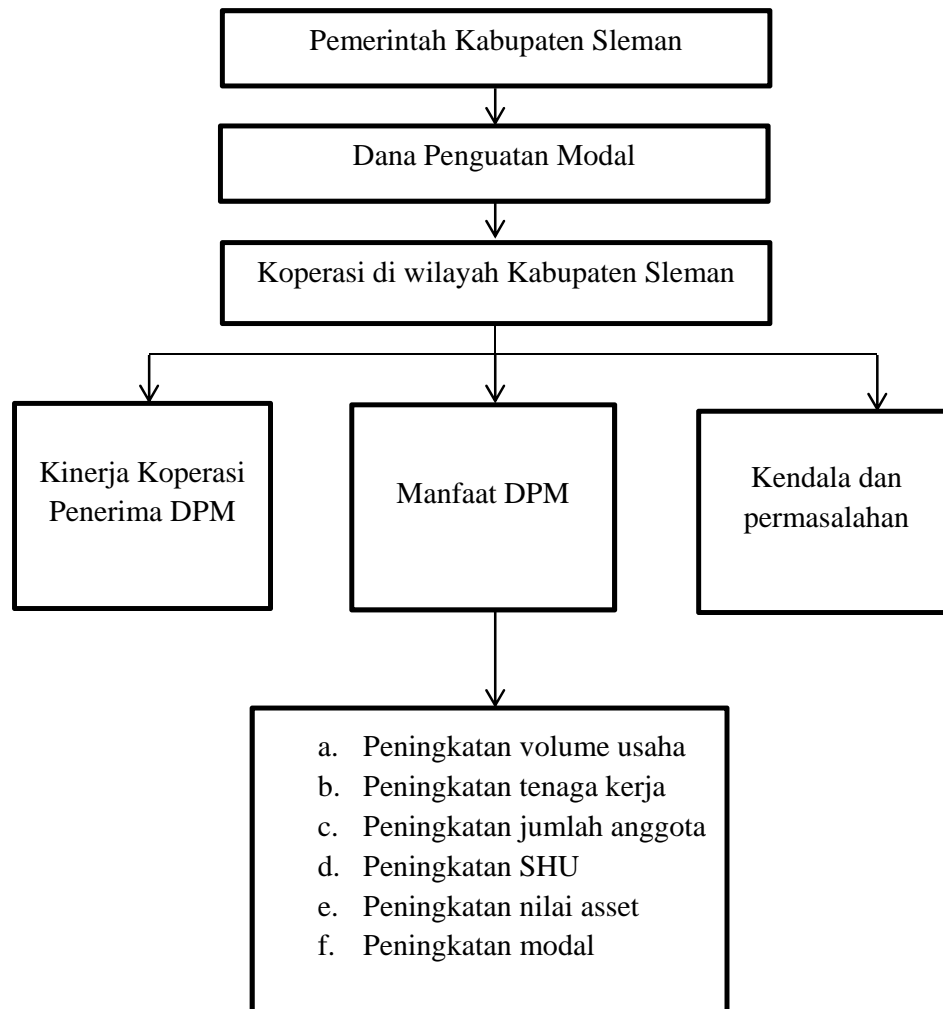
C. Kerangka Berpikir

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal melaksanakan program Dana Penguatan Modal. Dana penguatan modal merupakan dana yang diberikan kepada pelaku usaha di Kabupaten Sleman yaitu berupa pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Bagi pelaku usaha, dalam hal ini kelompok koperasi, adanya dana bantuan ini diharapkan dapat mengatasi salah satu permasalahan, yakni dalam hal permodalan.

Koperasi penerima dana pinjaman, dalam hal ini DPM, berkesempatan untuk mengembangkan usahanya. Tambahan modal dari DPM dapat digunakan oleh koperasi untuk menambah modal kerja ataupun untuk membeli aset. Harapan akhirnya adalah adanya kemajuan usaha koperasi sebagai akibat penggunaan DPM.

Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya terdiri dari banyak orang atau masyarakat, sehingga dengan adanya peningkatan usaha pada koperasi maka anggota koperasi atau masyarakat yang ikut menjadi anggota di koperasi tersebut kesejahteraannya akan ikut meningkat. Dalam pemanfaatannya, penerima DPM mungkin mengalami kendala atau kesulitan yang menghambat atau mengurangi kemanfaatan dari dana yang diperoleh.

Secara lebih ringkas, kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Studi manfaat dana penguatan modal pada koperasi di Kabupaten Sleman ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif. Menurut Hadari Nawawi (2007: 67) Penelitian deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai adanya. Penelitian ini berusaha menggambarkan kinerja koperasi penerima DPM dan ingin mengetahui apakah penyaluran dana penguatan modal bermanfaat bagi koperasi penerima dana bantuan modal tersebut, sejauh mana manfaatnya serta kendala dan permasalahan yang dialami.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan mendatangi langsung responden dan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan berupa angket (kuesioner). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait, berupa data dana penguatan modal dan data koperasi penerima bantuan dana penguatan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

B. Definisi Operasional Variabel

Dana penguatan modal adalah dana bergulir yang disediakan kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil dan menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang diperuntukkan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya.

Kemanfaatan dana penguatan modal yang telah diberikan kepada sektor koperasi di Sleman dapat dilihat dengan berbagai indikator, antara lain: volume usaha, jumlah anggota, SHU, nilai asset dan modal koperasi. Selain itu kemanfaatan dana penguatan modal juga dapat diketahui melalui persepsi responden yang merupakan perwakilan dari koperasi mengenai DPM, kemanfaatan DPM, dan proses administratif DPM.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Sleman dengan subjek penelitian koperasi penerima dana penguatan modal di wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2014 sampai dengan bulan Juli 2014.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2009: 118) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah semua koperasi di wilayah Kabupaten Sleman yang merupakan penerima dana penguatan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Jumlah koperasi menurut proyeksi RKPD Sleman tahun 2014 adalah sejumlah 626 unit, sedangkan yang aktif diperkirakan sejumlah 608 unit. Untuk jumlah koperasi penerima dana penguatan modal di Sleman dari tahun 2010 adalah sejumlah 124 unit, yang merupakan populasi dari penelitian ini.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 116). Sampel yang dipakai harus mencerminkan dan mewakili populasi yang ada. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah dari koperasi penerima dana penguatan modal yang masih belum melunasi pengembalian dana penguatan modal sampai dengan Januari 2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling* yang diambil dari koperasi penerima dana penguatan modal, yaitu sebanyak 40 koperasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Kuesioner/Angket

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya menggunakan metode kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009: 142). Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2010: 194) menyatakan

bahwa “kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”.

Dalam penelitian ini, menggunakan angket terbuka yaitu angket yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal dan angket tertutup yaitu angket yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah disediakan (Sugiyono, 2009: 143).

2. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Misalnya, mengetahui profil dana penguatan modal, daftar koperasi penerima dana penguatan modal, kinerja koperasi penerima dana penguatan modal.

F. Instrumen Penelitian

Dalam bukunya, Sugiyono (2009:148) menjelaskan instrumen penelitian adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen digunakan sebagai alat untuk membantu mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket dalam penelitian ini bertipe terbuka dan tertutup digunakan untuk

mengungkap data mengenai manfaat dana penguatan modal bagi koperasi di wilayah Kabupaten Sleman.

Skala pengukuran yang digunakan dalam angket ini ada dua, pertama menggunakan skala *Guttman*. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban tegas, yaitu “ya-tidak”. Skala *Guttman* yang dibuat dalam angket berbentuk pilihan ganda. Jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. Kedua menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden sebagai perwakilan koperasi terhadap kemanfaatan dana penguatan modal bagi koperasi. Instrumen penelitian yang menggunakan skala *Likert* pada penelitian ini adalah berbentuk *checklist*. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, pada penelitian ini berupa jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu diberi skor, sebagai berikut:

Tabel 4. Alternatif Jawaban dan Skor Angket

Alternatif Jawaban	Positif	Negatif
Sangat Setuju (SS)	4	1
Setuju (S)	3	2
Tidak Setuju (TS)	2	3
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	4

Titik tolak dari penyusunan instrumen adalah dari variabel penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Dari variabel tersebut diberikan definisi

operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2008: 103). Untuk memudahkan hal tersebut, maka perlu digunakan kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No.	Aspek	Indikator	Butir No
1.	Kinerja koperasi penerima DPM	a. Bidang usaha b. Lama usaha c. Jumlah anggota d. Nilai asset e. SHU	B, D
2.	Kemanfaatan dana penguatan modal	a. Peningkatan volume usaha b. Peningkatan tenaga kerja c. Peningkatan jumlah anggota d. Peningkatan SHU e. Peningkatan nilai asset f. Peningkatan modal g. Persepsi responden mengenai kemanfaatan DPM	D, F
3.	Kendala dan permasalahan yang dihadapi	a. Informasi mengenai DPM b. Survey kelayakan, pengawasan dan pendampingan c. Proses pengajuan, pencairan dan pengembalian DPM d. <i>Punishment</i> dan <i>reward</i>	E, G, H

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2007).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisis keadaan objek studi melalui uraian, pengertian ataupun penjelasan-penjelasan, baik terhadap analisis yang bersifat terukur maupun tidak terukur. Analisis deskriptif juga merupakan suatu teknik analisis yang menggambarkan data-data yang telah terkumpul secara deskriptif sehingga tercipta sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

Secara garis besar, pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. *Editing*

Proses *editing* ialah memeriksa kembali data yang diperoleh dari kuisioner apakah data yang diperoleh sudah lengkap sehingga dapat diproses lebih lanjut. Bebebara hal yang perlu diperhatikan ialah kelengkapan pengisian kuisioner, keterbacaan tulisan, relevansi jawaban dengan pertanyaan dan keseragaman.

2. *Coding*

Dalam *coding* dilakukan pengklasifikasian data atau jawaban responden ke dalam kategori tertentu. Sebelum data yang diperoleh diproses ke dalam komputer terlebih dahulu data tersebut dirubah kedalam bentuk *numeric* atau angka.

3. Tabulasi

Tabulasi merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk tabel berisikan data sesuai dengan yang dibutuhkan untuk analisis. Tujuan dari tabulasi ialah untuk mengelompokkan data kedalam tabel agar diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai hasil yang digambarkan angka-angka tersebut.

4. Analisis data dan pengambilan kesimpulan

Analisis data dilakukan untuk menjelaskan makna dan fakta yang ada dibalik angka-angka hasil penelitian secara deskriptif. Penjelasan diperoleh dengan menjabarkan hasil dan tabel hasil penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yakni kinerja koperasi penerima DPM, kemanfaatan DPM, sejauh mana manfaat DPM serta kendala dan permasalahan yang dihadapi koperasi penerima DPM.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum

a. Profil Kabupaten Sleman

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km². Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara.

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 110°12'57" sampai dengan 110°32'48" Bujur Timur dan 7°32'28" sampai dengan 7°50'11" Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul,

dan Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Padukuhan	
1.	Moyudan	4	65	2.762
2.	Minggir	5	68	2.727
3.	Seyegan	5	67	2.663
4.	Godean	7	77	2.684
5.	Gamping	5	59	2.925
6.	Mlati	5	74	2.852
7.	Depok	3	58	3.555
8.	Berbah	4	58	2.299
9.	Prambanan	6	68	4.135
10.	Kalasan	4	80	3.584
11.	Ngemplak	5	82	3.571
12.	Ngaglik	6	87	3.852
13.	Sleman	5	83	3.132
14.	Tempel	8	110	3.249
15.	Turi	4	42	4.309
16.	Pakem	5	61	4.384
17.	Cangkringan	5	73	4.799
	Jumlah	86	1.212	57.482

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, 2013

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk Sleman tercatat 1.126.888 jiwa, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2011 bertambah 33.778 orang atau 2,99% yaitu dari 1.093.110 orang pada Tahun 2010 menjadi 1.126.888 orang pada akhir tahun 2011. Dan dari tahun 2011 bertambah 9.714 orang atau 0,85% yaitu dari 1.126.602 orang pada tahun 2011 menjadi 1.136.602 orang pada akhir tahun 2012. Selengkapnya seperti pada tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman

No	Tahun	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
		Jiwa	%	Jiwa	%	
1.	2010	547.885	50,12	545.225	49,88	1.093.110
2.	2011	560.146	49,70	566.742	50,30	1.126.888
3.	2012	564.978	49,71	571.624	50,29	1.136.602

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2012

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah lebih banyak daripada penduduk berjenis kelamin laki-laki, walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan.

b. Profil Koperasi di Kabupaten Sleman

Salah satu usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Sleman adalah koperasi. Manfaat koperasi bisa dirasakan sampai lapisan bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat.

Jumlah koperasi pada tahun 2012 sebanyak 617 buah meningkat menjadi 623 buah pada tahun 2013. Jumlah koperasi aktif juga meningkat dari 554 pada tahun 2012 menjadi 562 pada tahun 2013. Jumlah anggota semakin meningkat dari 240.522 orang pada tahun 2012 menjadi 263.874 orang pada tahun 2013.

Hasil usaha koperasi juga mengalami peningkatan. Dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami peningkatan yaitu dari Rp211.178.095.000 pada tahun 2012 menjadi Rp255.382.800.000 pada

tahun 2013. Jumlah volume usaha sebesar Rp819.373.452.000 pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp972.774.539.000 pada tahun 2013. Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.18.927.502.000 pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp22.145.886.000 pada tahun 2013.

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Sleman tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Perkembangan Koperasi Tahun 2010-2013 di Kabupaten Sleman

Koperasi		Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1)	Jumlah Koperasi	598	604	617	623
2)	Kondisi Koperasi				
	- Koperasi aktif	526	550	554	562
	- Koperasi tidak aktif	72	54	54	50
3)	Jumlah Anggota Koperasi	233.362	234.584	240.522	263.874
4)	Jumlah Modal Sendiri (000)	142.559.739	173.695.120	211.178.095	255.382.800
	Volume Usaha (000)	720.095.806	732.070.941	819.373.452	972.774.539
	SHU (000)	15.895.654	16.508.855	18.927.502	22.145.886

Sumber: Dinas Indagkop, 2013

c. Profil KP3M Kabupaten Sleman

1) Sejarah KP3M

Diawali pada tahun 2001, dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan Percontohan Otonomi Daerah Tahap I. Beberapa penataan kelembagaan mulai diatur termasuk penetapan kewenangan penanaman modal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, kewenangan penanaman modal ditangani Subdinas Penanaman Modal dibawah Dinas Perekonomian dengan Kasubdin dijabat oleh Dra. Tri Endah Yitnani.

Pada tahun 2003 dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 dan berdasarkan evaluasi kelembagaan maka ditetapkan Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana kewenangan penanaman modal bukan lagi ditangani oleh Subdin Penanaman Modal akan tetapi ditangani oleh Bidang Penanaman Modal di bawah Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dengan Kepala Bidang dijabat oleh Dra. Tri Endah Yitnani.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan terhadap Organisasi Perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2003 ditemukan beberapa permasalahan antara lain: Program penguatan modal yang telah digulirkan menunjukkan peningkatan baik dari sisi jumlah maupun cakupan sasaran sehingga struktur yang ada saat itu tidak memadai.

Penanganan investasi/penanaman modal yang dilakukan belum didasarkan pada kajian yang analitis dan belum ditangani oleh struktur yang kapabel.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kajian kelembagaan yang diusulkan untuk peningkatan jumlah dan cakupan sasaran dana penguatan modal perlu diimbangi dengan keberadaan satuan kerja yang bersifat mandiri yaitu Badan Pengelolaan Penguatan dan Penyertaan Modal Daerah, sehingga pengelolaan akan lebih efektif karena ditangani dalam satu manajemen yang akan mempermudah koordinasi dan pengendaliannya. Untuk kewenangan penanaman modal tetap di tangani Bidang Penanaman Modal Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal.

Dalam perkembangannya kebijakan yang diambil adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009

tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dimana ketugasan pengelolaan penanaman, penguatan dan penyertaan modal berada di Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal (KP3M) dengan Kepala Kantor dijabat oleh Retno Susiati, S.H, M.M. oleh karena itu, sejak tahun 2010 KP3M resmi menyalurkan DPM dibantu dengan instansi teknis yang terkait.

2) Dasar Hukum Pembentukan

- a) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
- b) Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja.

3) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok KP3M adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal, penguatan modal dan penyertaan modal. Sedangkan fungsi KP3M antara lain:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman, penguatan dan penyertaan modal;
- b) Pelaksanaan tugas bidang penanaman, penguatan dan penyertaan modal;
- c) Penyelenggaraan pelayanan umum bidang penanaman, penguatan dan penyertaan modal;

- d) Pembinaan bidang penanaman, penguatan dan penyertaan modal;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Profil Pemberian DPM di Kabupaten Sleman

Dana penguatan modal (DPM) adalah dana bergulir yang disediakan kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil dan menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang diperuntukkan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya.

Maksud dan tujuan penyaluran dana penguatan modal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menciptakan peluang usaha masyarakat guna peningkatan pendapatan masyarakat.

Penerima pinjaman DPM memiliki jangka waktu pengembalian dana penguatan modal paling lama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan masa tenggang (*grace period*) 4 (empat) bulan. Masa tenggang (*grace period*) adalah masa pada awal periode angsuran dimana penerima dana penguatan modal tidak membayar angsuran pokok tetapi diwajibkan membayar kontribusi.

Kontribusi adalah imbal jasa atas pemanfaatan dana penguatan modal. Penerima dana penguatan modal wajib memberikan kontribusi

sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total dana penguatan modal yang diterimanya selama jangka waktu pemberian dana penguatan modal. Selama masa tenggang (*grace period*) penerima dana penguatan modal hanya wajib membayar kontribusi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal (KP3M) Kabupaten Sleman telah melaksanakan program Dana Penguatan Modal (DPM) sampai dengan saat ini guna memperkuat aspek permodalan bagi para pengusaha di Kabupaten Sleman, termasuk pelaku usaha Koperasi di Kabupaten Sleman. Dalam melaksanakan program DPM, KP3M melakukan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang menangani pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis sesuai dengan jenis bidang dana penguatan modal. Bidang koperasi sendiri dibina dan diawasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Dinas Perindagkop).

Berdasarkan data yang ada, sampai dengan 31 Desember 2013, besaran DPM yang dikucurkan untuk koperasi dan UKM mencapai Rp26.382.000 dengan pengembalian sebesar Rp19.869.988,50 atau 75,32% dari keseluruhan DPM yang telah dikucurkan untuk koperasi dan UKM. Besaran DPM yang masih menjadi piutang untuk koperasi dan UKM mencapai Rp6.512.011,50 atau 24,68% dari keseluruhan

DPM yang telah dikucurkan untuk koperasi dan UKM. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Data Penyaluran, Pengembalian dan Piutang Pokok Dana Penguatan Modal di Kabupaten Sleman sampai dengan 31 Desember 2013

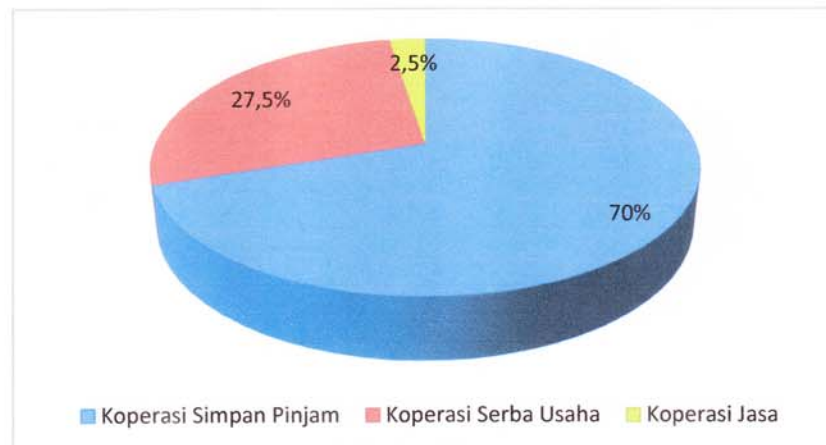
No.	Uraian	Penyaluran (Rp Ribu)	Pengembalian (Rp Ribu)	Persentase (%)	Piutang (Rp Ribu)	Persentase (%)
I.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	126.166.928,05	106.050.455,15	84,06	20.116.472,90	15,94
II.	Dinas Perindagkop.	36.034.000,00	26.943.696,50	74,77	9.090.303,50	25,23
1	Perindustrian (APBD)	8.938.000,00	6.513.032,60	72,87	2.424.967,40	27,13
2	Perindustrian (APBN)	714.000,00	560.675,40	78,53	153.324,60	21,47
3	Koperasi dan UKM	26.382.000,00	19.869.988,50	75,32	6.512.011,50	24,68
III.	Dinas Nakersos	8.448.750,00	5.813.465,32	68,81	2.635.284,68	31,19
IV.	Badan KB, PM & PP	6.525.000,00	3.927.122,55	60,19	2.597.877,45	39,81
V.	Dinas Budpar	2.655.000,00	1.361.500,00	51,28	1.293.500,00	48,72
VI.	Dinas Pasar	1.647.000,00	540.752,50	32,83	1.106.247,50	67,17
	Jumlah	181.476.678,05	171.580.688,52	94,55	9.895.989,53	5,45

Sumber: Laporan DPM Kabupaten Sleman semester II tahun 2013 (data diolah)

2. Kinerja Koperasi Penerima DPM

a. Bidang Usaha

Sebagian besar bidang usaha koperasi yang dijadikan objek penelitian pada penelitian ini merupakan koperasi simpan pinjam yang jumlahnya mencapai 28 koperasi (70%) dari keseluruhan koperasi yang diteliti. Sedangkan koperasi yang diteliti lainnya adalah berjenis koperasi serba usaha yang berjumlah sebanyak 11 koperasi (27,5%) dan koperasi jasa yang berjumlah hanya 1 koperasi saja (2,5%). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



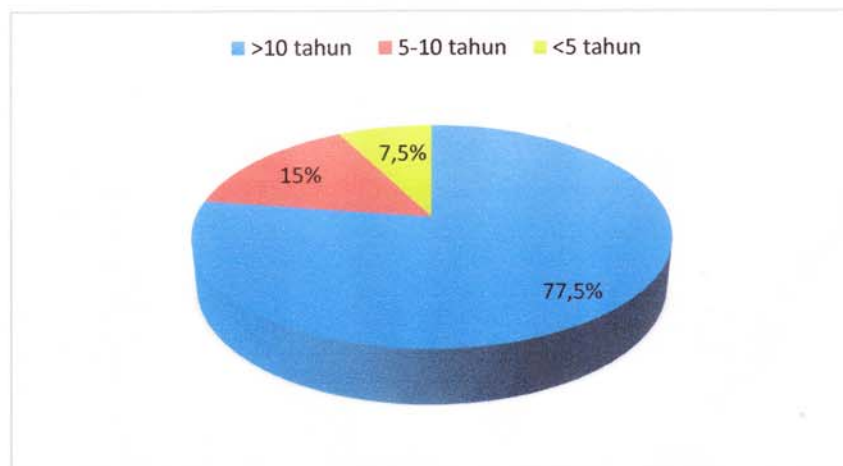
Gambar 2. Bidang Usaha Koperasi

Hal ini menggambarkan bahwa bidang usaha koperasi yang mendominasi adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam lebih mendominasi dikarenakan identik dengan sumber pembiayaan

yang ramah dan mudah di jangkau tanpa syarat berbelit dengan asas kekeluargaan serasa milik sendiri sehingga munculah pendapat di masyarakat bahwa ketika menyebut koperasi, orang akan dengan mudah mencitrakan koperasi sebagai tempat meminjam uang.

b. Lama Usaha

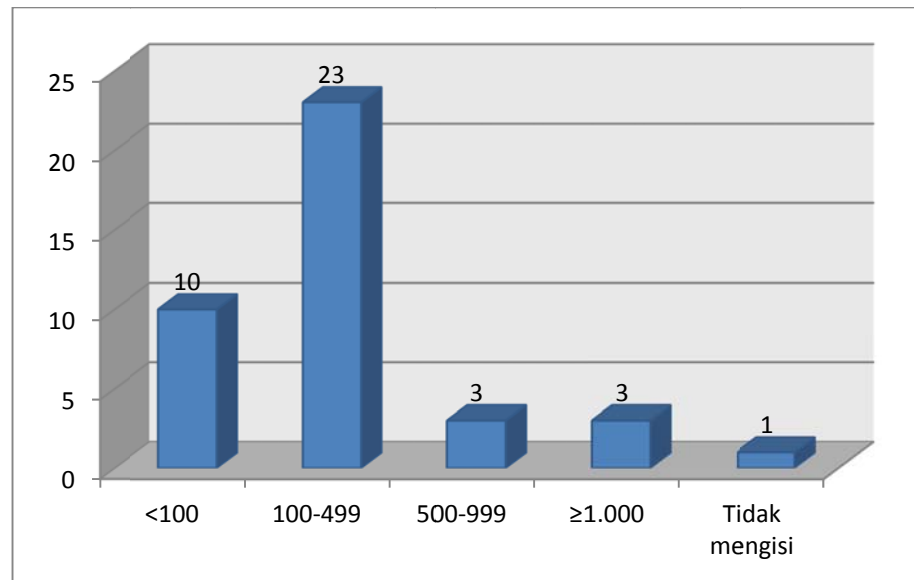
Berdasarkan hasil penelitian, lama usaha koperasi yang dijadikan objek penelitian didominasi oleh koperasi yang berumur lebih dari 10 tahun, dimana jumlahnya mencapai 31 koperasi (77,5%) dari keseluruhan koperasi yang diteliti. Untuk koperasi yang berumur 0-5 tahun berjumlah 3 koperasi (7,5%) dan koperasi yang berumur lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun berjumlah 6 koperasi (15%).



Gambar 3. Lama Usaha Koperasi

c. Jumlah Anggota

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah anggota koperasi yang dijadikan objek penelitian dapat digolongkan sebagai berikut.



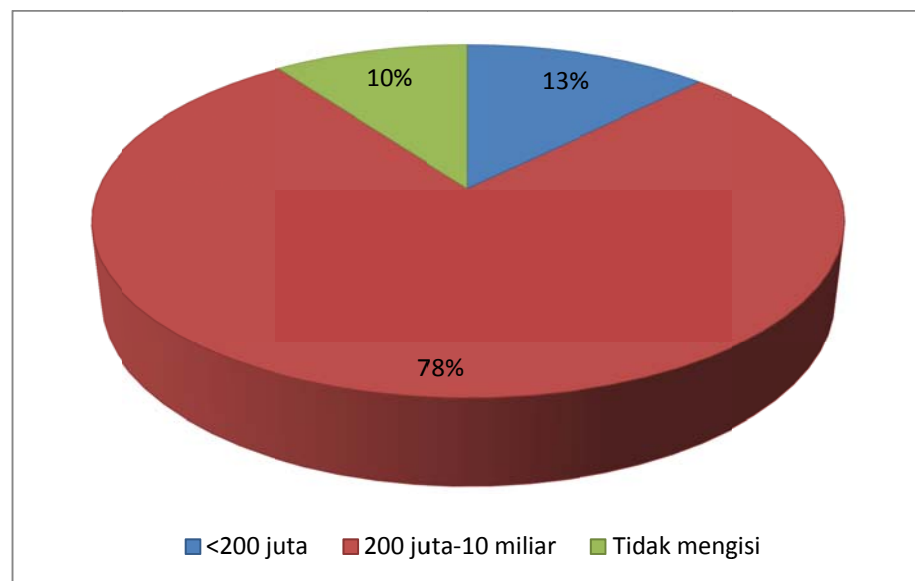
Gambar 4. Jumlah Anggota Koperasi

Setiap koperasi pastilah mempunyai anggota karena anggota koperasi merupakan salah satu syarat pembentukan koperasi. Diagram di atas menunjukkan informasi tentang distribusi jumlah anggota koperasi yang dijadikan objek penelitian. Dapat dilihat bahwa koperasi dalam penelitian ini didominasi oleh koperasi yang beranggotakan 100-499 orang yang jumlahnya mencapai 23 koperasi atau sejumlah 57,5% dari seluruh koperasi yang diteliti. Sedangkan untuk koperasi yang beranggotakan <100 orang berjumlah 10 koperasi (25%),

koperasi yang beranggotakan 500-999 orang berjumlah 3 koperasi (7,5%), koperasi yang beranggotakan ≥ 1.000 orang berjumlah 3 koperasi (7,5%) dan yang tidak menjawab berjumlah 1 koperasi (2,5%). Jumlah anggota terbanyak dalam satu koperasi adalah 3.866 orang dan jumlah paling sedikit dalam satu koperasi adalah 38 orang.

d. Nilai Asset

Berdasarkan hasil penelitian, nilai asset koperasi yang dijadikan objek penelitian dapat digolongkan sebagai berikut.



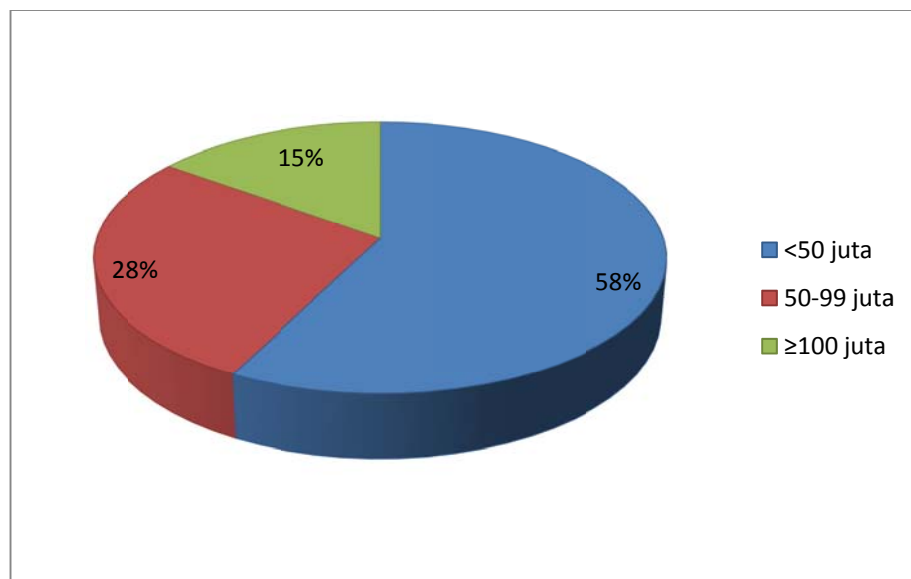
Gambar 5. Nilai Asset Koperasi

Nilai asset merupakan salah satu indikator apakah koperasi tersebut masuk dalam usaha kecil dan menengah. Diagram di atas

menunjukkan bahwa koperasi yang dijadikan objek penelitian didominasi oleh koperasi dengan nilai asset 200 juta-10 milyar yang berjumlah 31 koperasi atau 78% dari seluruh koperasi yang diteliti. Sedangkan koperasi yang memiliki nilai asset <200 juta berjumlah 5 koperasi dan yang tidak menjawab sejumlah 4 koperasi (10%). Nilai asset tertinggi pada koperasi yang diteliti adalah Rp5.322.343.788 dan yang terendah adalah Rp5.000.000.

e. SHU

Berdasarkan hasil penelitian, SHU koperasi yang dijadikan objek penelitian dapat digolongkan sebagai berikut.

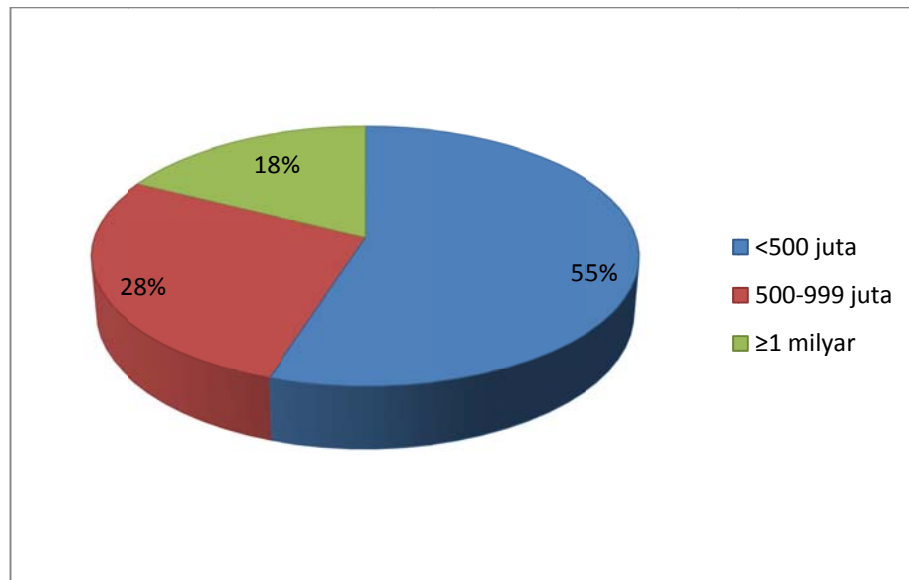


Gambar 6. SHU Koperasi

SHU koperasi menggambarkan kinerja suatu koperasi. Koperasi yang mampu menghasilkan SHU dengan nominal tinggi maka semakin tinggi juga manfaat yang akan diterima oleh anggota koperasi yang berujung pada kesejahteraan anggota koperasi tersebut. Tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa koperasi yang dijadikan objek penelitian didominasi oleh koperasi yang menghasilkan SHU <50 juta dengan jumlah 23 koperasi atau 58% dari keseluruhan koperasi yang diteliti. Sedangkan koperasi yang menghasilkan SHU 50-99 juta berjumlah 11 koperasi (28%) dan koperasi yang mampu menghasilkan SHU ≥ 100 juta berjumlah 6 koperasi (15%). Nilai SHU tertinggi pada koperasi yang diteliti adalah Rp378.576.000 dan yang terendah adalah Rp5.000.000.

f. Modal Koperasi

Berdasarkan hasil penelitian, modal koperasi yang dijadikan objek penelitian dapat digolongkan sebagai berikut.



Gambar 7. Modal Koperasi

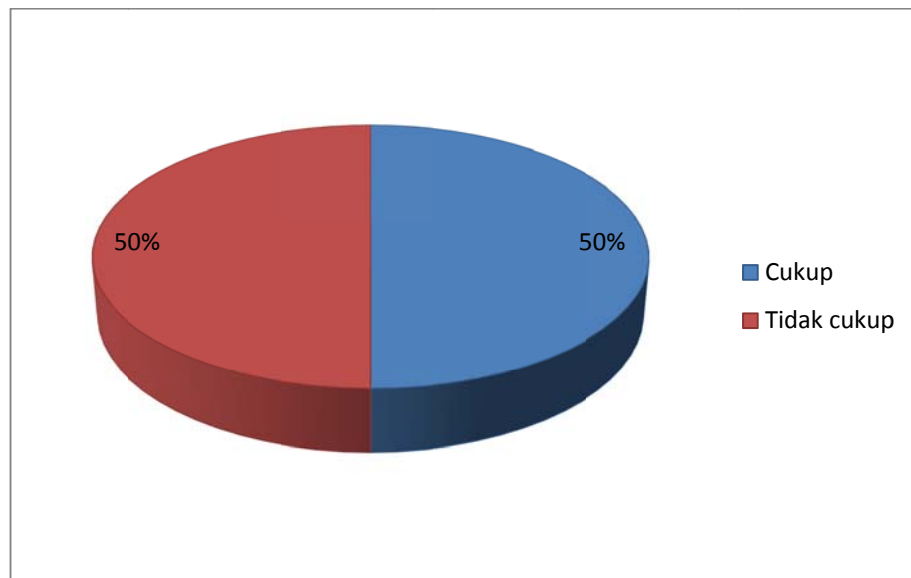
Modal koperasi menunjukkan potensi dari sebuah koperasi untuk berkembang. Tabel dan diagram di atas memuat informasi tentang koperasi yang menjadi objek penelitian. Mayoritas koperasi yang diteliti adalah koperasi dengan modal <500 juta yaitu berjumlah 22 koperasi atau 55% dari keseluruhan koperasi yang diteliti. Sedangkan koperasi dengan modal 500-999 juta berjumlah 11 koperasi (28%) dan koperasi dengan modal ≥1 milyar berjumlah 7 koperasi (18%). Modal koperasi tertinggi dari koperasi yang dijadikan objek

penelitian adalah sebesar Rp2.865.362.781,00 dan yang terkecil adalah sebesar Rp30.000.000,00.

3. Kemanfaatan DPM

a. Ketercukupan Jumlah Pinjaman DPM yang diberikan

Sebelum menilai kemanfaatan DPM bagi koperasi, perlu untuk melihat terlebih dahulu ketercukupan jumlah pinjaman DPM yang diterima oleh masing-masing koperasi. Berdasarkan data jumlah pinjaman DPM yang diberikan kepada masing-masing koperasi, besar pinjamannya berkisar antara Rp30.000.000,00 sampai Rp800.000.000,00. Berikut ini persepsi pengurus koperasi penerima DPM terhadap ketercukupan dana yang diterima.



Gambar 8. Persepsi Ketercukupan Jumlah Pinjaman DPM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 dari 40 responden atau 50% dari keseluruhan responden menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang diterima sudah mencukupi. Sedangkan 20 responden lainnya yaitu 50% atau setengahnya menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang diterima belum atau tidak mencukupi kebutuhan koperasi. Ketidakcukupan ini disebabkan oleh ketimpangan antara jumlah pinjaman yang diterima dengan jumlah anggota koperasi, modal yang dimiliki dan volume usaha koperasi tersebut.

b. Pengalokasian DPM oleh Koperasi

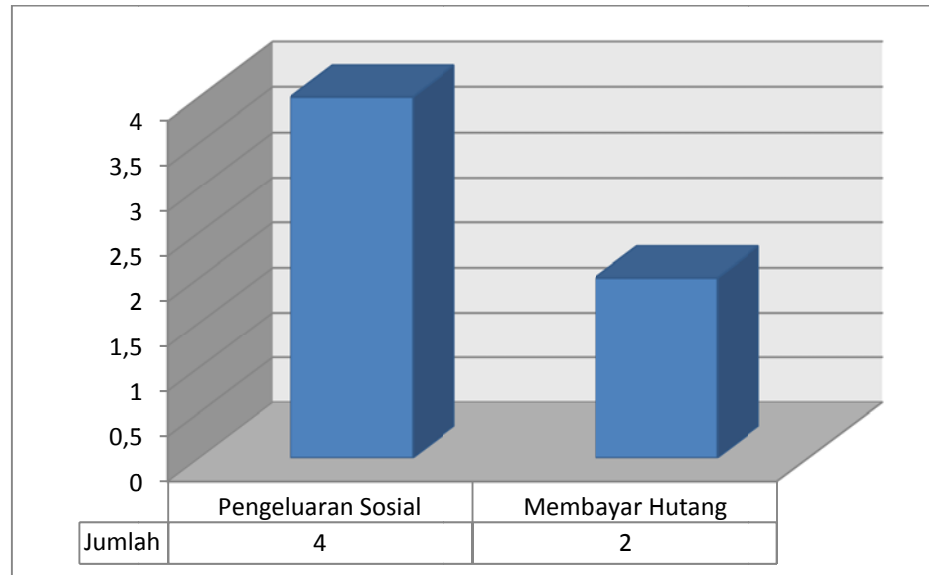
Pengalokasian dana DPM oleh koperasi merupakan indikator dalam keberhasilan pemberian DPM. Pemberian DPM bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya sehingga dalam hal ini, kesejahteraan anggota koperasi dapat menjadi lebih baik. Akan tetapi dalam pemanfaatan dana DPM tersebut di lapangan, ada kemungkinan terjadi penyelewengan. Dana DPM yang seharusnya digunakan untuk tujuan produktif, bisa jadi digunakan untuk kegiatan non-produktif, seperti membayar hutang atau *CSR*. Berikut adalah hasil penelitian mengenai pengalokasian penggunaan dana DPM oleh koperasi.

Tabel 10. Pengalokasian Penggunaan DPM

Pengalokasian DPM	Jumlah	Persentase (%)
Menambah modal kerja	40	100
Membeli asset	0	0
Total	40	100

Sumber: Data primer diolah, 2014

Dari 40 koperasi yang dijadikan objek penelitian, semuanya atau 100% menggunakan dana DPM untuk kegiatan produktif berupa penambahan modal kerja. Hal ini sesuai dengan tujuan DPM, yaitu dana DPM diperuntukkan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usaha, khususnya dalam hal ini usaha koperasi. Dari hasil penelitian lainnya pun menunjukkan dari 40 koperasi yang diteliti, hanya 5 koperasi atau 12,5% dari keseluruhan koperasi yang menyelewengkan dana DPM yaitu menggunakan dana DPM untuk tujuan non-produktif seperti yang digambarkan dalam grafik di bawah ini.

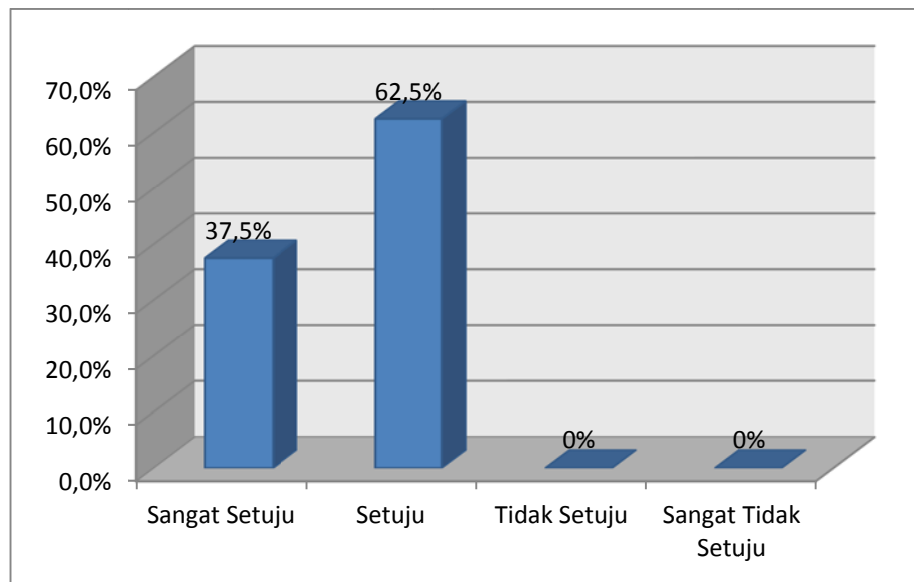


Gambar 9. Penyelewengan Penggunaan DPM

Untuk mengidentifikasi penyelewengan yang dilakukan, masing-masing koperasi diperbolehkan memilih jawaban lebih dari satu sehingga diperoleh hasil seperti di atas. Dari 5 koperasi yang di awal diketahui menyelewengkan penggunaan DPM, diidentifikasi bahwa ternyata yang menggunakan DPM untuk pengeluaran sosial seperti CSR sejumlah 4 koperasi, sedangkan yang menggunakan DPM untuk membayar hutang sejumlah 2 koperasi. Penggunaan DPM untuk pengeluaran sosial dan membayar hutang ini tentu akan mempengaruhi kemanfaatan dari DPM.

c. Kebermanfaatan DPM dalam Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi

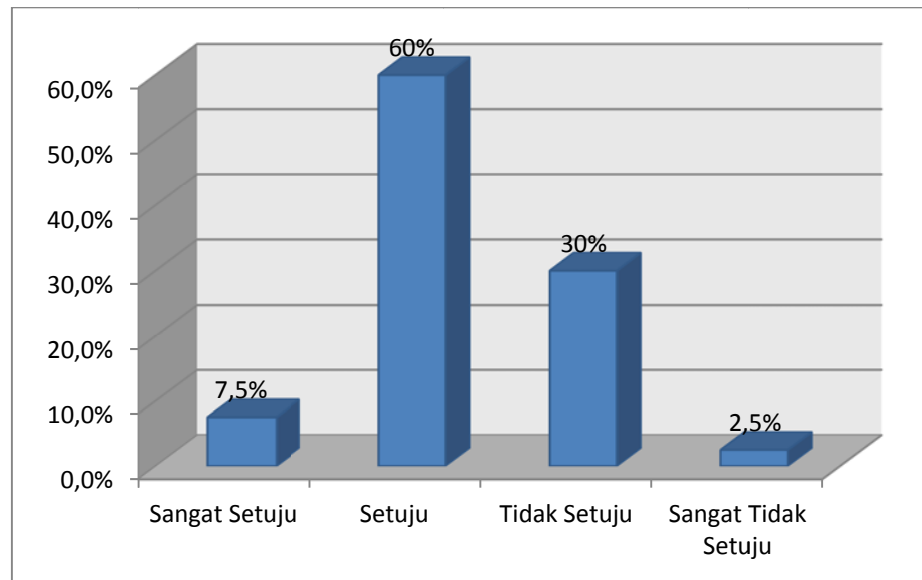
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui persepsi responden terhadap manfaat yang dirasakan dalam peningkatan kinerja usaha koperasi adalah sebagai berikut.



Gambar 10. Persepsi Manfaat DPM dalam Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa secara umum responden menyatakan setuju bahwa DPM bermanfaat dalam membantu peningkatan kinerja usaha koperasi, bahkan tidak ada responden yang menyatakan sebaliknya atau tidak setuju. Bagi responden, DPM merupakan hal yang dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha koperasi, hal ini terlihat ketika mereka ditanyakan bila tidak ada DPM apakah koperasi akan kesulitan

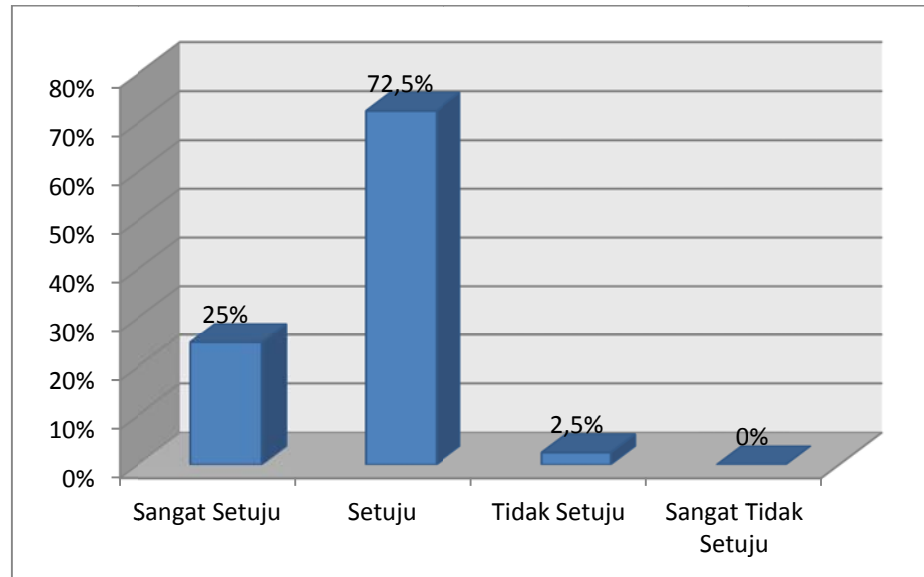
menjalankan usaha menjalankan usaha, mayoritas menyatakan setuju seperti yang terlihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 11. Persepsi Responden tentang Kesulitan Usaha Tanpa Adanya DPM

d. Kebermanfaatan DPM dalam Perkembangan Usaha Koperasi

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui persepsi responden terhadap manfaat yang dirasakan dalam perkembangan usaha koperasi adalah sebagai berikut.

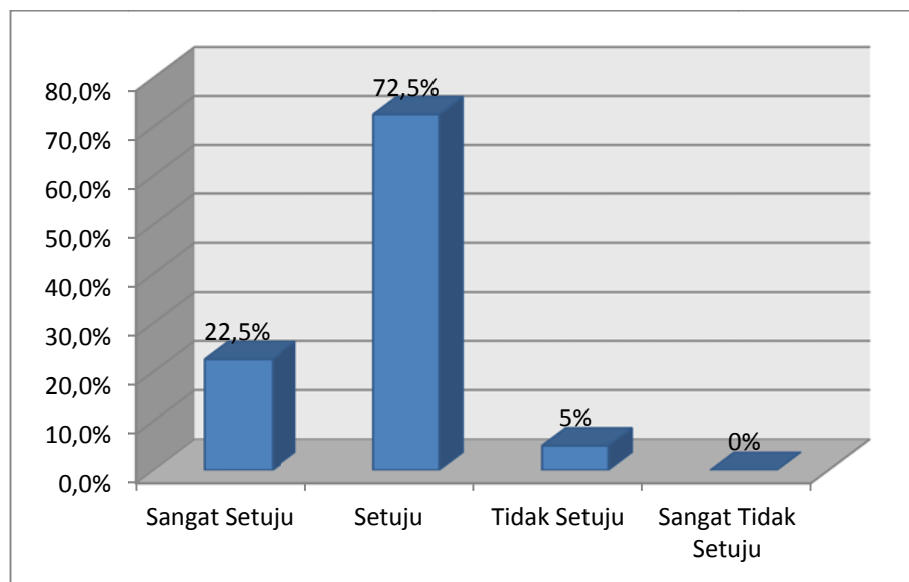


Gambar 12. Persepsi Manfaat DPM dalam Perkembangan Usaha Koperasi

Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa secara umum responden menyatakan setuju bahwa DPM bermanfaat dalam membantu perkembangan usaha koperasi. Dari 40 responden hanya 2,5% yang menyatakan bahwa DPM tidak bermanfaat terhadap perkembangan usaha koperasi. Hal ini sejalan dengan persepsi responden sebelumnya mengenai manfaat DPM terhadap peningkatan kinerja usaha koperasi.

e. Kebermanfaatan DPM dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui persepsi responden terhadap manfaat yang dirasakan dalam peningkatan kesejahteraan anggota koperasi adalah sebagai berikut.

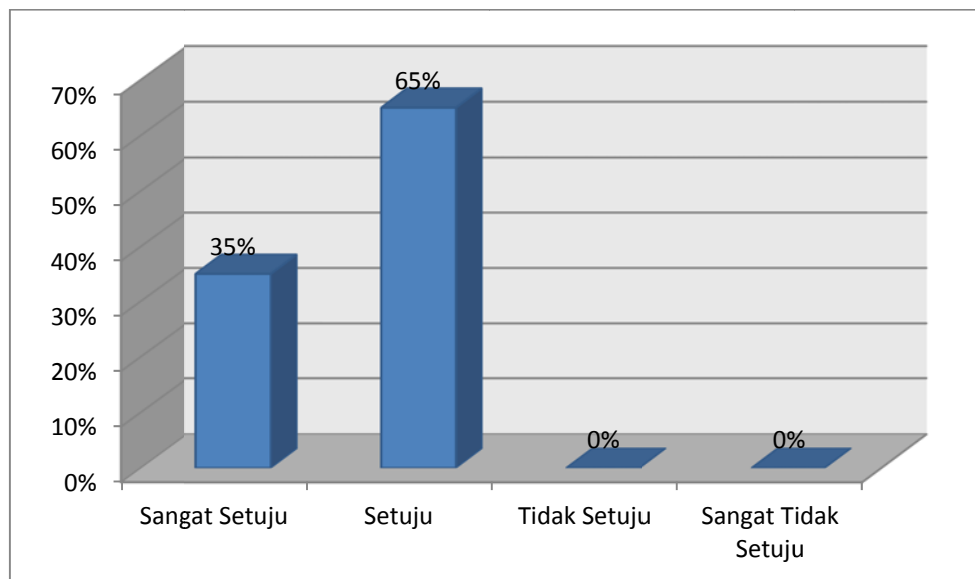


Gambar 13. Persepsi Manfaat DPM dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi

Diagram di atas menunjukkan bahwa hanya 5% dari 40 responden yang menyatakan bahwa DPM tidak bermanfaat dalam perkembangan kesejahteraan anggota koperasi. Hal ini berarti mayoritas responden menyatakan bahwa DPM bermanfaat dalam perkembangan kesejahteraan anggota koperasi dan sejalan dengan hasil persepsi sebelumnya mengenai peningkatan kinerja usaha dan

perkembangan usaha koperasi. Adanya peningkatan kinerja usaha dan perkembangan usaha tentunya akan meningkatkan kesempatan kesejahteraan anggota koperasi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa DPM bermanfaat untuk koperasi. Manfaat tersebut merupakan hal positif yang diperoleh atau dirasakan oleh anggota kelompok koperasi yang menerima pinjaman DPM. Hal ini didukung dengan hasil penelitian mengenai persepsi kemanfaatan DPM secara umum yang hasilnya sebagai berikut.



Gambar 14. Persepsi Manfaat DPM untuk Koperasi

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa semua responden menyatakan setuju bahwa DPM bermanfaat untuk koperasi. Kemanfaatan DPM tentunya akan menghasilkan perubahan positif dalam hal

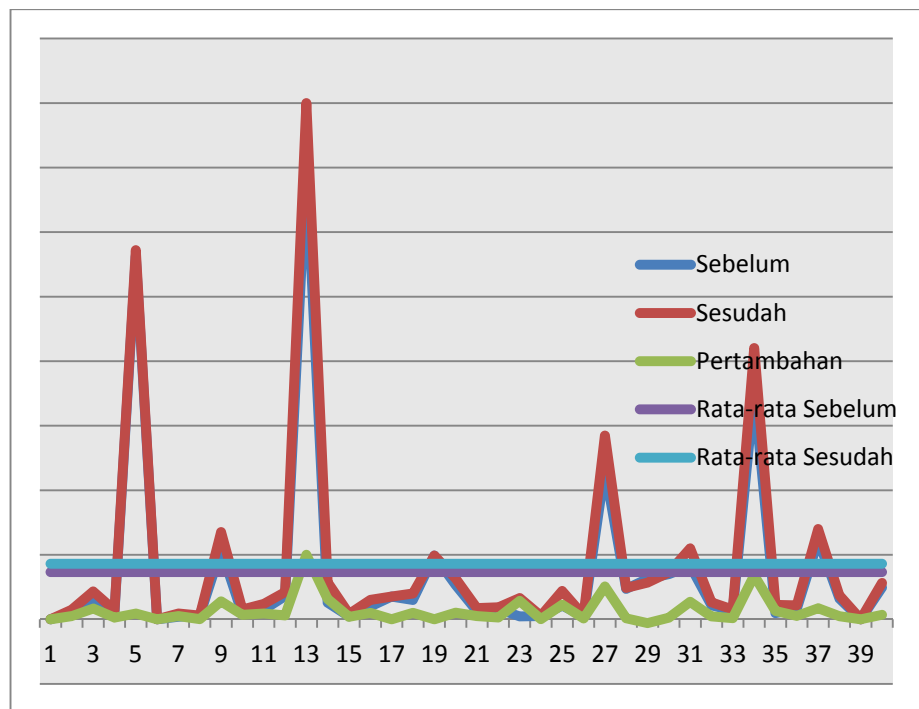
peningkatan kinerja usaha dan perkembangan usaha koperasi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan anggota koperasi.

4. Bentuk Kemanfaatan DPM

Bentuk kemanfaatan DPM untuk koperasi akan dilihat dari aspek-aspek berikut ini.

a. Volume Usaha

Berikut ini merupakan grafik perubahan volume usaha pada koperasi penerima DPM.



Gambar 15. Volume Usaha Koperasi Sebelum dan Sesudah Menerima DPM

Sedangkan ringkasan perubahan volume usaha koperasi penerima DPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data secara lengkap ada di lampiran.

Tabel 11. Perubahan dan Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Penerima DPM

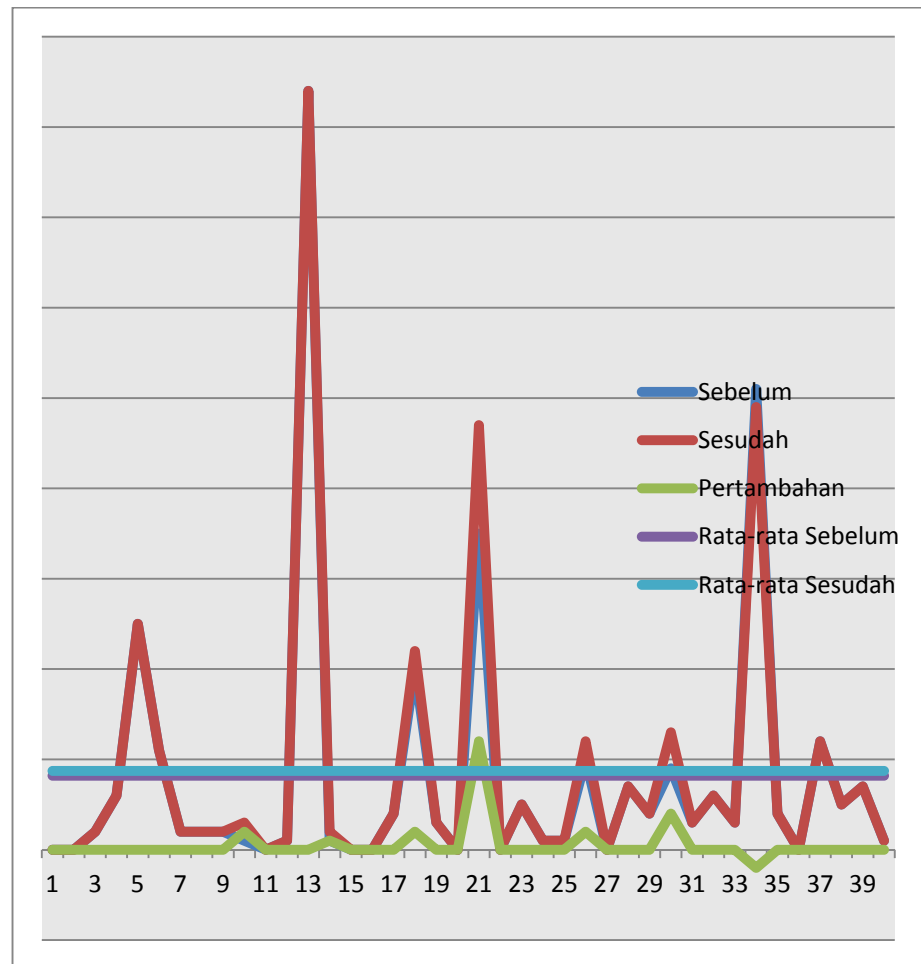
Periode	Rata-rata	Terendah	Tertinggi
Sebelum	1.466.623.517,63	1.257.500.000,00	88.676.250,00
Sesudah	1.722.833.560,18	1.139.670.000,00	660.052.265,00
Pertumbuhan	256.210.042,55	(117.830.000,00)	571.376.015,00
	48,41%	-9%	644%

Sumber: Data primer diolah, 2014

Rata-rata volume usaha koperasi penerima DPM sebelum menerima DPM adalah Rp1.466.623.517,63 dan rata-rata volume usaha koperasi setelah menerima DPM adalah Rp1.722.833.560,18. Berarti terjadi kenaikan rata-rata volume usaha dari sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Pertumbuhan volume usaha rata-rata adalah sebesar Rp256.210.042,55 atau setara dengan 48,41%.

b. Tenaga Kerja

Berikut ini merupakan grafik perubahan jumlah tenaga kerja pada koperasi penerima DPM.



Gambar 16. Jumlah Tenaga Kerja Koperasi Sebelum dan Sesudah Menerima DPM

Sedangkan ringkasan perubahan jumlah tenaga kerja koperasi penerima DPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data secara lengkap ada di lampiran.

Tabel 12. Perubahan dan Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Koperasi Penerima DPM

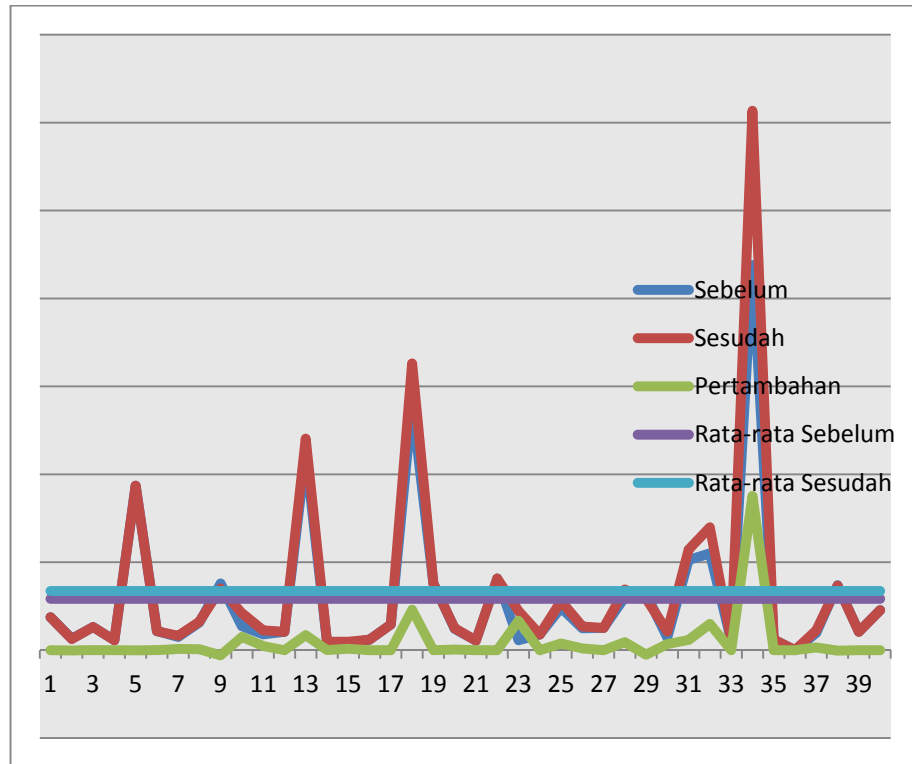
Periode	Rata-rata	Terendah	Tertinggi
Sebelum	8	51	1
Sesudah	9	49	3
Pertumbuhan	1	(2)	2
	9,26%	-4%	200%

Sumber: Data primer diolah, 2014

Rata-rata jumlah tenaga kerja koperasi penerima DPM sebelum menerima DPM adalah 8 orang dan rata-rata jumlah tenaga kerja koperasi setelah menerima DPM adalah 9 orang. Berarti terjadi kenaikan rata-rata jumlah tenaga kerja dari sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja rata-rata adalah sebesar 1 orang atau setara dengan 9,26%.

c. Anggota Koperasi

Berikut ini merupakan grafik perubahan jumlah anggota pada koperasi penerima DPM.



Gambar 17. Jumlah Anggota Koperasi Sebelum dan Sesudah Menerima DPM

Sedangkan ringkasan perubahan jumlah anggota koperasi penerima DPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data secara lengkap ada di lampiran.

Tabel 13. Perubahan dan Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Penerima DPM

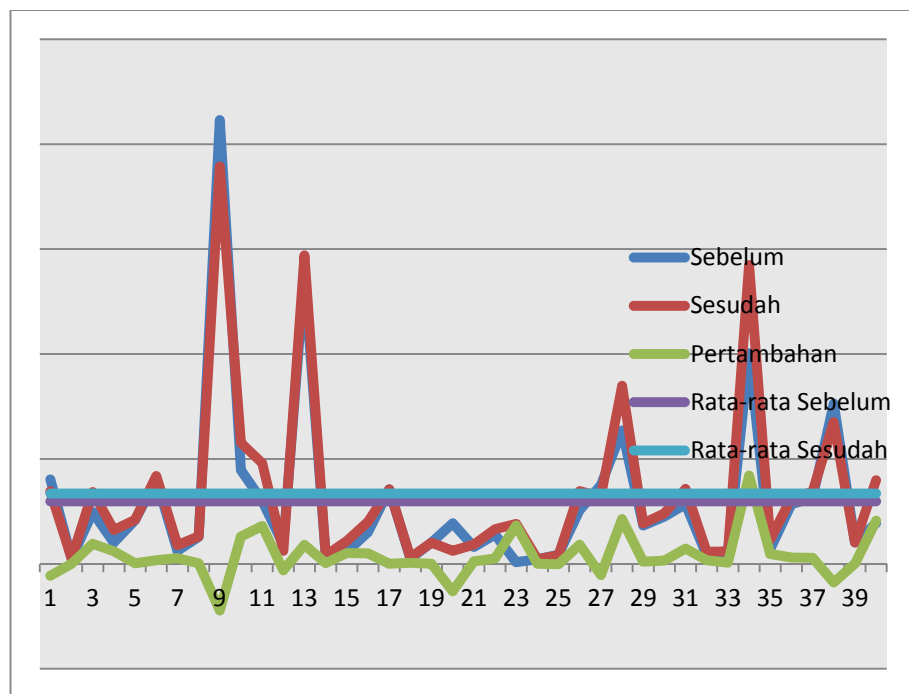
Periode	Rata-rata	Terendah	Tertinggi
Sebelum	292	320	56
Sesudah	336	294	223
Pertumbuhan	44	(26)	167
	15,01%	-8,13%	298%

Sumber: Data primer diolah, 2014

Rata-rata jumlah anggota koperasi penerima DPM sebelum menerima DPM adalah 292 orang dan rata-rata jumlah anggota koperasi setelah menerima DPM adalah 336 orang. Berarti terjadi kenaikan rata-rata jumlah anggota koperasi dari sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi rata-rata adalah sebesar 44 orang atau setara dengan 15,01%.

d. SHU

Berikut ini merupakan grafik perubahan SHU pada koperasi penerima DPM.



Gambar 18. SHU Koperasi Sebelum dan Sesudah Menerima DPM

Sedangkan ringkasan perubahan SHU koperasi penerima DPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data secara lengkap ada di lampiran.

Tabel 14. Perubahan dan Pertumbuhan SHU Koperasi Penerima DPM

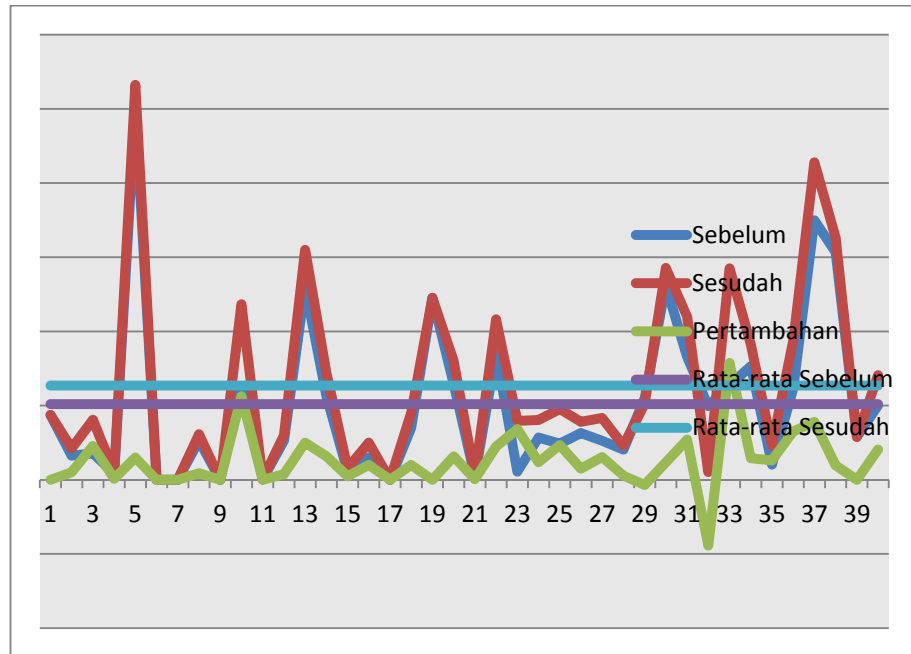
Periode	Rata-rata	Terendah	Tertinggi
Sebelum	59.502.382,98	38.565.186,00	1.510.172,00
Sesudah	67.004.666,25	12.386.214,00	37.994.645,00
Pertumbuhan	7.502.283,28	(26.178.972,00)	36.484.473,00
	77,01%	-67,88%	2.416%

Sumber: Data primer diolah, 2014

Rata-rata SHU koperasi penerima DPM sebelum menerima DPM adalah Rp59.502.382,98 dan rata-rata SHU koperasi setelah menerima DPM adalah Rp67.004.666,25. Berarti terjadi kenaikan rata-rata SHU koperasi dari sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Pertumbuhan SHU koperasi rata-rata adalah sebesar Rp7.502.283,28 atau setara dengan 77,01%.

e. Nilai Asset

Berikut ini merupakan grafik perubahan nilai asset pada koperasi penerima DPM.



Gambar 19. Nilai Asset Koperasi Sebelum dan Sesudah Menerima DPM

Sedangkan ringkasan perubahan nilai asset koperasi penerima DPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data secara lengkap ada di lampiran.

Tabel 15. Perubahan dan Pertumbuhan Nilai Asset Koperasi Penerima DPM

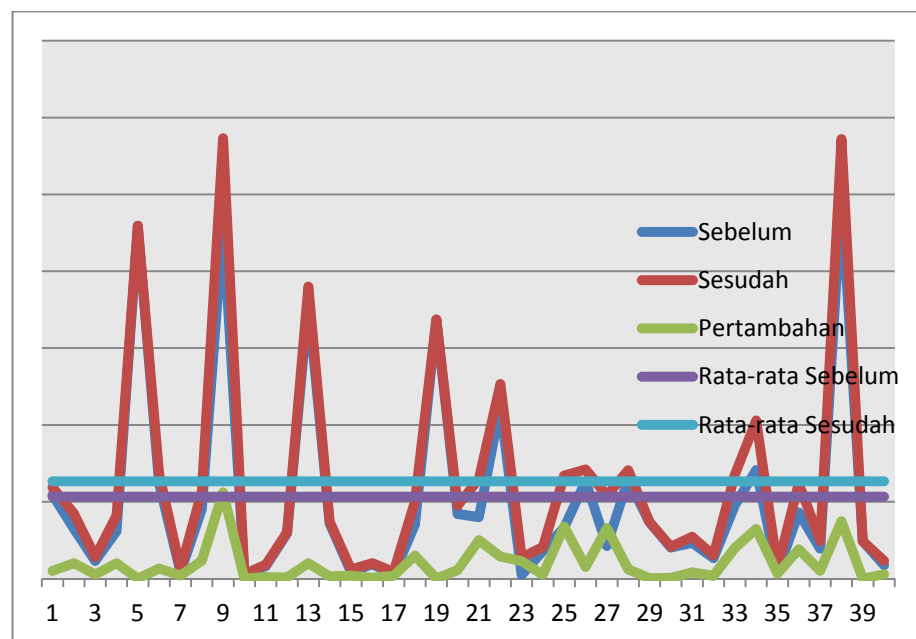
Periode	Rata-rata	Terendah	Tertinggi
Sebelum	1.019.004.087,89	991.199.900,00	109.308.788,00
Sesudah	1.270.516.090,63	104.389.523,00	792.751.624,00
Pertumbuhan	251.512.002,74	(886.810.377,00)	683.442.836,00
	43,79%	-89,47%	625%

Sumber: Data primer diolah, 2014

Rata-rata nilai asset koperasi penerima DPM sebelum menerima DPM adalah Rp1.019.004.087,89 dan rata-rata nilai asset koperasi setelah menerima DPM adalah Rp1.270.516.090,63. Berarti terjadi kenaikan rata-rata nilai asset koperasi dari sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Pertumbuhan nilai asset koperasi rata-rata adalah sebesar Rp251.512.002,74 atau setara dengan 43,79%.

f. Modal

Berikut ini merupakan grafik perubahan modal pada koperasi penerima DPM.



Gambar 20. Modal Koperasi Sebelum dan Sesudah Menerima DPM

Sedangkan ringkasan perubahan modal koperasi penerima DPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data secara lengkap ada di lampiran.

Tabel 16. Perubahan dan Pertumbuhan Modal Koperasi Penerima DPM

Periode	Rata-rata	Terendah	Tertinggi
Sebelum	533.123.926,35	243.592.862,00	23.800.000,00
Sesudah	633.434.965,08	243.592.862,00	137.469.615,00
Pertumbuhan	100.311.038,73	0	113.669.615,00
	39,30%	0%	477,60%

Sumber: Data primer diolah, 2014

Rata-rata modal koperasi penerima DPM sebelum menerima DPM adalah Rp533.123.926,35 dan rata-rata modal koperasi setelah menerima DPM adalah Rp633.434.965,08. Berarti terjadi kenaikan rata-rata modal koperasi dari sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Pertumbuhan modal koperasi rata-rata adalah sebesar Rp100.311.038,73 atau setara dengan 39,30%.

5. Kendala dan Permasalahan DPM

Kendala dan permasalahan bisa saja dihadapi oleh penerima DPM. Kendala dan permasalahan tersebut diklasifikasikan ke dalam.

a. Kendala dan Masalah Internal

1) Ketidakmampuan Koperasi Menyalurkan DPM

DPM akan menjadi bermanfaat apabila mampu dikelola secara maksimal yaitu dengan cara disalurkan ke anggota koperasi. Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan, ada beberapa koperasi penerima DPM yang tidak mampu menyalurkan dana dan membiarkan DPM menjadi mengendap. Hal ini beberapa dikarenakan oleh adanya penurunan tingkat pinjaman di koperasi penerima DPM. Perlu diketahui, 28 dari 40 koperasi penerima DPM atau 70% dari koperasi penerima DPM adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Apabila ternyata tingkat pinjaman di koperasi tersebut turun, maka otomatis DPM yang didapatkan tidak dapat disalurkan.

2) Ketidakmampuan Koperasi Mengenali Karakter Anggota

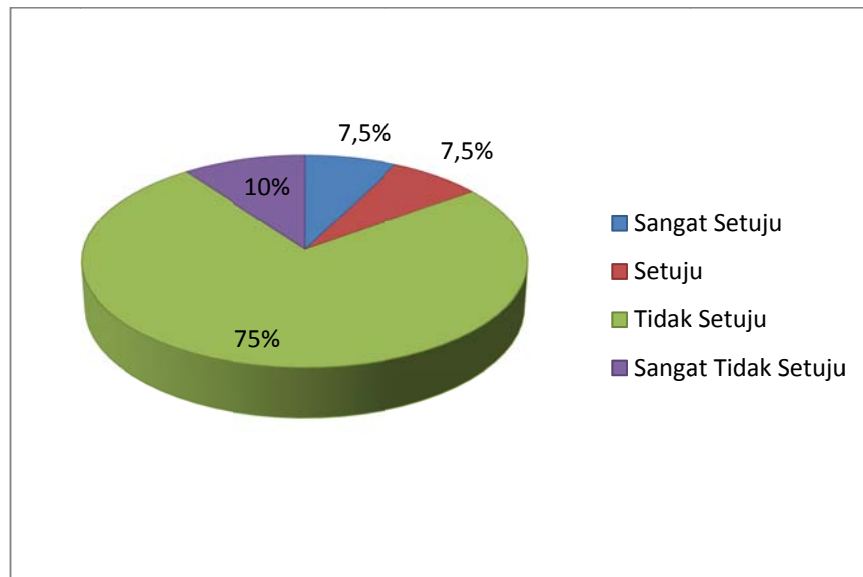
Koperasi yang mendapatkan DPM didominasi oleh koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Koperasi yang bergerak di bidang ini berfokus untuk menyalurkan DPM dengan cara peminjaman kepada anggota koperasi nya. Namun, karena koperasi kesulitan mengenali karakter masing-masing anggotanya maka ada beberapa koperasi yang ketika meminjamkan dana kepada anggotanya tidak dapat kembali, atau dengan kata lain gagal bayar.

Hal ini berakibat pada kemampuan koperasi tersebut mengangsur pengembalian DPM.

b. Kendala dan Masalah Eksternal

1) Prosedur Pengajuan DPM Berbelit-belit

Berdasarkan hasil penelitian persepsi responden terhadap prosedur pengajuan DPM didapatkan hasil sebagai berikut.



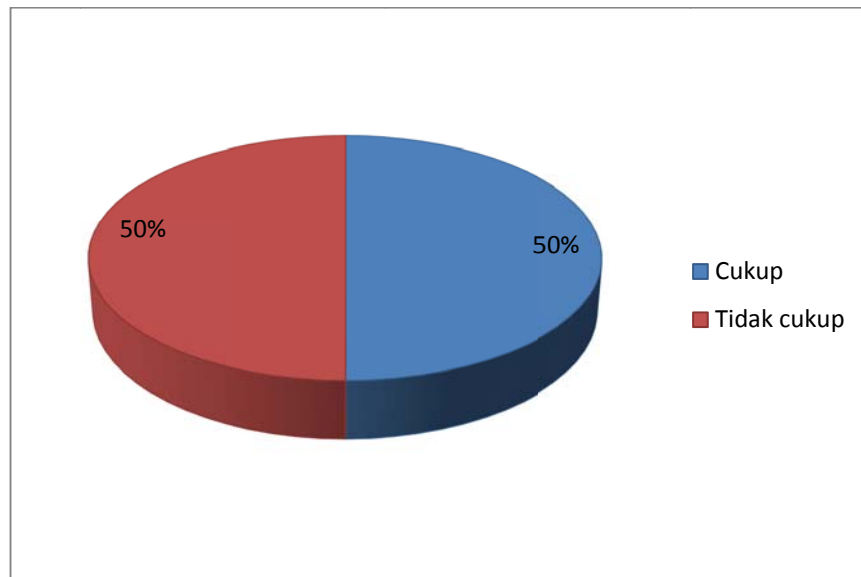
Gambar 21. Persepsi Responden terhadap Proses Pengajuan DPM

Dari diagram di atas dapat dicermati bahwa sebagian besar responden menyatakan tidak setuju bahwa proses pengajuan DPM berbelit-belit. Mereka beranggapan bahwa prosedur pengajuan DPM yang sudah berjalan saat ini mudah. Dari 40 responden hanya 6 orang atau 15% responden yang menyatakan prosedur pengajuan

DPM berbelit-belit. Melalui wawancara kemudian diketahui kesulitan mereka dikarenakan form proposal yang ada terlalu rumit dan perlu adanya panduan yang memudahkan mereka dalam pembuatan proposal pengajuan DPM.

2) Jumlah Pinjaman Terlalu Kecil

Berdasarkan hasil penelitian persepsi responden terhadap ketercukupan DPM didapatkan hasil sebagai berikut.



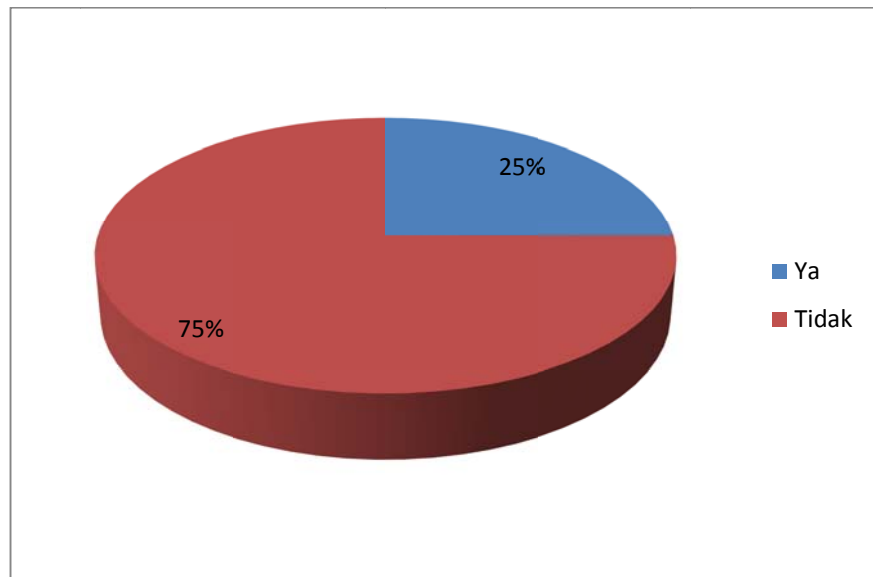
Gambar 22. Persepsi Responden terhadap Ketercukupan Jumlah Pinjaman DPM yang Diterima

Dari diagram di atas dapat disimpulkan ada 20 dari 40 responden atau 50% dari seluruh koperasi yang menerima DPM menyatakan bahwa jumlah pinjaman DPM yang mereka terima tidak mencukupi. Hal ini dikarenakan jumlah pinjaman DPM yang

mereka terima tidak sebanding dengan besar volume usaha, banyak anggota dan modal yang mereka miliki.

3) Besaran Kontribusi yang Memberatkan

Berdasarkan hasil penelitian persepsi responden terhadap kontribusi yang koperasi bayarkan terlalu tinggi atau tidak didapatkan hasil sebagai berikut.



Gambar 23. Persepsi Responden terhadap Kontribusi DPM

Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas menyatakan bahwa kontribusi DPM tidak memberatkan. Namun ada 10 dari 40 responden atau sekitar 25% dari seluruh responden yang menyatakan sebaliknya. Mereka beranggapan bahwa seharusnya DPM tidak perlu adanya kontribusi sehingga koperasi

cukup mengembalikan atau mengangsur DPM sejumlah yang mereka terima saja.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kinerja Koperasi Penerima DPM

Dapat diketahui bahwa mayoritas koperasi penerima DPM adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Jumlahnya mencapai 28 dari 40 koperasi yang diteliti atau sekitar 70% dari keseluruhan koperasi yang diteliti. Karena mayoritas koperasi penerima DPM adalah koperasi simpan pinjam maka dapat dilogika apabila volume usaha, modal, jumlah anggota, SHU dan nilai asset koperasi tersebut lumayan besar. Untuk mengetahui kinerja koperasi penerima DPM tersebut maka perlu dilihat dari SHU, modal dan nilai asset masing-masing koperasi tersebut. Dapat diketahui bahwa berdasarkan SHU koperasi yang diteliti didominasi oleh koperasi yang mempunyai SHU <50 juta yaitu sejumlah 23 dari 40 koperasi atau sebesar 58% dari keseluruhan koperasi yang diteliti. Berdasarkan nilai asset, koperasi yang diteliti didominasi oleh koperasi yang mempunyai nilai asset 200 juta-10 milyar yang apabila dijumlah sebanyak 31 dari 40 koperasi atau sebesar 78% dari seluruh koperasi yang diteliti. Berdasarkan modal koperasi, koperasi yang diteliti didominasi oleh koperasi yang mempunyai modal <500 juta yaitu sejumlah 22 koperasi atau sebesar 55% dari seluruh koperasi yang diteliti. Hal ini

membuktikan bahwa DPM tersalurkan kepada koperasi yang berskala kecil dan menengah. Tentu saja hal ini sesuai dengan tujuan DPM yang memang diperuntukkan kepada usaha kecil dan menengah. Tentunya dengan kinerja koperasi yang sedemikian itu dan ditambah dengan adanya DPM maka kinerja koperasi dapat lebih baik lagi dan berujung pada kesejahteraan anggota koperasi.

2. Kemanfaatan DPM

Manfaat DPM tentu merupakan hasil yang diharapkan oleh koperasi penerima DPM setelah mereka menerima DPM. Manfaat DPM tersebut terwujud pada peningkatan kinerja usaha, perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Berdasarkan persepsi responden, mayoritas menyatakan bahwa terjadi peningkatan pada kinerja usaha, perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota koperasi. Secara umum pun, mayoritas responden menyatakan bahwa DPM bermanfaat bagi koperasi. Hal ini menjadi bukti bahwa memang tujuan penyaluran DPM untuk koperasi tercapai.

3. Bentuk Kemanfaatan DPM

Manfaat DPM tidak hanya dapat diketahui lewat persepsi dari responden saja, tetapi juga dengan adanya penelitian pada beberapa aspek koperasi, yaitu volume usaha, tenaga kerja, jumlah anggota, SHU, nilai asset dan modal koperasi. Berikut ini tabel yang memuat ringkasan dari bentuk kemanfaatan DPM dari keenam aspek tersebut.

Tabel 17. Perubahan dan Pertumbuhan Koperasi Penerima DPM

Aspek	Rata-rata Sebelum	Rata-rata Sesudah	Perbedaan Sebelum dengan Sesudah	Pertumb uhan (%)
Volume Usaha	1.466.623.518	1.722.833.560	256.210.043	48,41
Tenaga Kerja	8	9	1	9,26
Jumlah Anggota	292	336	44	15,01
SHU	59.502.383	67.004.666	7.502.283	77,01
Nilai Asset	1.019.004.088	1.270.516.091	251.512.003	43,79
Modal	533.123.926	633.434.965	100.311.039	39,30

Sumber: Data primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari keenam aspek, semuanya mengalami pertumbuhan. Hal ini menjadi bukti bahwa memang DPM bermanfaat bagi koperasi. Pertumbuhan yang paling signifikan terdapat pada aspek SHU yang pertumbuhannya mencapai 77,01%. Kenaikan jumlah tenaga kerja dan jumlah anggota yang sebesar 9,26% dan 15,01% merupakan petunjuk bahwa mayoritas koperasi yang diteliti merupakan koperasi berskala kecil dan menengah yang memang mempunyai jumlah tenaga kerja dan jumlah anggota sedikit. Pertumbuhan SHU dan volume usaha yang signifikan dibandingkan dengan nilai asset merupakan bukti bahwa memang koperasi penerima DPM menggunakan DPM sebagai tambahan modal kerja, bukan untuk membeli asset saja.

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan koperasi penerima DPM adalah sebesar 38,80%. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka inflasi di Indonesia pada tahun 2013 yang berada di kisaran 6,97%.

4. Kendala dan Permasalahan DPM

Kendala dan permasalahan DPM diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Kendala dan Masalah Internal

1) Ketidakmampuan Koperasi Menyalurkan DPM

DPM akan menjadi bermanfaat apabila mampu dikelola secara maksimal yaitu dengan cara disalurkan ke anggota koperasi. Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan, ada beberapa koperasi penerima DPM yang tidak mampu menyalurkan dana dan membiarkan DPM menjadi mengendap. Hal ini beberapa dikarenakan oleh adanya penurunan tingkat pinjaman di koperasi penerima DPM. Perlu diketahui, 28 dari 40 koperasi penerima DPM atau 70% dari koperasi penerima DPM adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Apabila ternyata tingkat pinjaman di koperasi tersebut turun, maka otomatis DPM yang didapatkan tidak dapat disalurkan.

2) Ketidakmampuan Koperasi Mengenali Karakter Anggota

Koperasi yang mendapatkan DPM didominasi oleh koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Koperasi yang bergerak di bidang ini berfokus untuk menyalurkan DPM dengan cara peminjaman kepada anggota koperasi nya. Namun, karena koperasi kesulitan mengenali karakter masing-masing anggotanya maka ada beberapa koperasi yang ketika meminjamkan dana kepada anggotanya tidak dapat kembali, atau dengan kata lain gagal bayar. Hal ini berakibat pada kemampuan koperasi tersebut mengangsur pengembalian DPM.

b. Kendala dan Masalah Eksternal

1) Prosedur Pengajuan DPM Berbelit-belit

Prosedur yang berbelit-belit merupakan salah satu alasan yang diutarakan oleh beberapa responden. Namun mayoritas responden beranggapan bahwa prosedur pengajuan DPM yang sudah berjalan saat ini mudah. Dari 40 responden hanya 6 orang atau 15% responden yang menyatakan prosedur pengajuan DPM berbelit-belit. Melalui wawancara kemudian diketahui kesulitan mereka dikarenakan form proposal yang ada terlalu rumit dan perlu adanya panduan yang memudahkan mereka dalam pembuatan proposal pengajuan DPM.

2) Jumlah Pinjaman Terlalu Kecil

Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada 20 dari 40 responden atau 50% dari seluruh koperasi yang menerima DPM menyatakan bahwa jumlah pinjaman DPM yang mereka terima tidak mencukupi. Hal ini dikarenakan jumlah pinjaman DPM yang mereka terima tidak sebanding dengan besar volume usaha, banyak anggota dan modal yang mereka miliki.

3) Besaran Kontribusi yang Memberatkan

Dari penelitian diketahui bahwa mayoritas menyatakan bahwa kontribusi DPM tidak memberatkan. Namun ada 10 dari 40 responden atau sekitar 25% dari seluruh responden yang menyatakan sebaliknya. Mereka beranggapan bahwa seharusnya DPM tidak perlu adanya kontribusi sehingga koperasi cukup mengembalikan atau mengangsur DPM sejumlah yang mereka terima saja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, landasan teori, hasil penelitian, analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi penerima DPM didominasi oleh jenis koperasi simpan pinjam yang kinerjanya dilihat dari SHU, modal dan nilai asset merupakan koperasi berskala kecil dan menengah, sesuai dengan tujuan DPM yang diperuntukkan kepada usaha kecil dan menengah.
2. Koperasi penerima DPM merasakan manfaat dari pinjaman DPM. Pada dasarnya koperasi memang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Setelah menerima DPM, usaha koperasi penerima DPM mengalami perkembangan.
3. Perkembangan usaha yang dirasakan meliputi, peningkatan volume usaha sebesar 48,41%, peningkatan tenaga kerja sebesar 9,26%, peningkatan jumlah anggota sebesar 15,01%, peningkatan SHU sebesar 77,01%, peningkatan nilai asset sebesar 43,79%, serta peningkatan modal sebesar 39,30%. Secara keseluruhan dapat ditarik rata-rata perkembangan usaha koperasi penerima DPM adalah sebesar 38,80%.

4. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi penerima DPM berasal dari internal dan eksternal. Kendala dan permasalahan internal antara lain, ketidakmampuan koperasi menyalurkan DPM dan ketidakmampuan koperasi mengenali karakter anggota. Sedangkan kendala dan permasalahan eksternal yaitu, prosedur pengajuan DPM yang berbelit-belit, jumlah pinjaman terlalu kecil dan besaran kontribusi yang memberatkan.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Fokus pembahasan penelitian ini hanya pada koperasi penerima DPM. Sisi anggota koperasi belum terkaji secara mendalam.
2. Penelitian ini melakukan perhitungan manfaat yang dirasakan penerima DPM secara umum, sehingga tidak ada perbedaan kajian antara penerima DPM yang baru menerima sebanyak satu periode dan yang lebih dari satu periode.

C. Saran Penelitian

1. Program DPM sangat dibutuhkan oleh koperasi sehingga program ini perlu dipertahankan, bahkan seharusnya diperbesar skalanya baik dari sisi jumlah dana yang diberikan maupun jumlah penerimanya.
2. Pemantauan rutin hendaknya dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pengembalian DPM, tetapi juga memantau keberlangsungan usaha

penerima. Hal ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan dinas-dinas terkait.

3. Pemantauan perkembangan usaha koperasi penerima DPM perlu dilakukan secara berkelanjutan agar koperasi yang membiarkan DPM yang diterima mengendap dapat terpantau, selain itu melalui hasil pemantauan, pihak KP3M dan dinas terkait dapat menjadikannya sebagai bahan rujukan evaluasi serta bahan rujukan untuk merumuskan program pendukung yang sesuai dengan koperasi penerima DPM.
4. Instansi atau dinas terkait perlu memperbanyak program pendampingan dan pelatihan terutama dalam hal pengelolaan usaha karena sangat bermanfaat bagi koperasi penerima DPM. Berikut ini beberapa program yang diinginkan oleh responden.
 - a. Pertemuan rutin antara semua koperasi penerima DPM dengan petugas dinas terkait dan KP3M sebagai wadah *sharing* antara sesama koperasi penerima DPM dan petugas.
 - b. Pelatihan mengenai penggunaan DPM secara efektif agar tidak ada DPM yang mengendap.
 - c. Pelatihan SDM mengenai mengenali karakter calon peminjam agar koperasi terhindar dari peminjam yang gagal bayar.
 - d. Sistem seperti “BI *checking*” sehingga ada daftar *blacklist* untuk peminjam yang gagal bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Rifda Zahra & Setiawan, Achma Hendra (2012). *“Analisis Bantuan Modal dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (Studi Kasus: KPUM di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah)”*. Diambil dari:
http://eprints.undip.ac.id/35806/1/JURNAL_Analisis_Bantuan_Modal_dan_Kredit_bagi_KPUM_oleh_Dinas_KUMKM_Kota_Semarang.pdf, pada tanggal 10 April 2014
- Alhusain, Achmad Sani. (2009). *“Analisa Kebijakan Permodalan dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Provinsi Bali dan Sulawesi Utara)”*. Diambil dari:
http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/14409575604_0853-9316.pdf, pada tanggal 12 Februari 2014.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 2010)”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baswir, Revrisond. (2000). *“Koperasi Indonesia”*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Budiwati, Neti. (2009). *“Manajemen Keuangan dan Permodalan Koperasi”*. Diambil dari:
<http://www.netibudiwati.blogspot.com/2009/04/manajemen-keuangan-danpermodalan.html>, pada tanggal 12 Februari 2014
- Djazh, Dahlan. (1980). *“Pengetahuan Koperasi”*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Efendi, Ahmad Zarkasi. dkk. (2012). *“Demokrasi Ekonomi: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”*. Malang: Averroes Press.
- Fahmi, Irham. (2011). *“Analisis Laporan Keuangan”*. Bandung: Alfabeta.
- Hamonangan, Mohamad Anugrah. (2010). *“Kajian Partisipasi Penerima Manfaat Dana Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang”*. Diambil dari:
http://eprints.undip.ac.id/23676/1/MOHAMAD_ANUGRAH_HAMONANGAN.pdf, pada tanggal 10 April 2014
- Harsono, Priyo. (2010). *“Analisis Bantuan Kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terhadap Perkembangan UMK Binaan KUB Rukun Mina Barokah di Kecamatan Juwana”*. Diambil dari:
http://eprints.undip.ac.id/26379/1/ANALISIS_BANTUAN_KREDIT

_DARI_DINAS_KELAUTAN_DAN_PERIKANAN_KABUPATE
N_PATI_TERHADAP_PERKEMBANGAN_UM.pdf, pada tanggal
10 April 2014

Hendar & Kusnadi. (2005). *“Ekonomi Koperasi: Untuk Perguruan Tinggi (Edisi Kedua)”*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2004). *“Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 27”*. Jakarta: Salemba Empat.

Laporan Pengelolaan Dana Penguatan Modal Kabupaten Sleman Semester II Tahun 2013.

Mahmudi. (2005). *“Manajemen Kinerja Sektor Publik”*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Moleong, Lexy J. (2007). *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. (2007). *“Metode Penelitian Bidang Sosial”*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Oktarina, Yetty. (2009). *“Dampak Dana Penguatan Modal untuk Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Padi Sawah di Desa Gunung Kuripan Kec. Pengandonan Kabupaten OKU”*. Diambil dari <http://agronobisunbara.files.wordpress.com/2012/11/11-hal-78-88-yetty.pdf>, pada tanggal 11 April 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Dana Penguatan Modal.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Dana Penguatan Modal.

Siagian, S.P. (1978). *“Peranan Staf Dalam Manajemen”*. Jakarta: Gunung Agung.

Sijabat, Saudin. (2008). “Potret Iklim Usaha Pemberdayaan UKMK”. *Infokop Volume 16 - September 2008*. Hlm. 1-17.

Sitio, Arifin & Tamba, Halomoan. (2001). *“Koperasi: Teori dan Praktik”*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2008). *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *"Statistik Untuk Penelitian"*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, Toto. (2013). "3 Penyebab Koperasi di Indonesia Sulit Berkembang". Diambil dari:
<http://m.bisnis.com/industri/read/20130914/87/162904/3-penyebab-koperasi-di-indonesia-sulit-berkembang>, pada tanggal 10 April 2014.
- Sukirno, Sadono. (2011). *"Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2009). *"Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa"*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suprpto. (1999). "Dana berputar Menumbuhkembangkan Usaha Ekonomi Produktif. *Majalah Desa Kita*. Hlm. 23.
- Tambunan, Tulus T.H. (2002). *"Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Responden

No.	Nama Responden	Nama Koperasi	Bidang Usaha Koperasi
1	Drs. Wahyudi	Koperasi Simpan Pinjam Tabah Swakarya	SP
2	Mujiana	KPRI Harapan	SP
3	Endang Dwi Lestariningsih	KPRI Wana Mandiri	SP, SU, Jasa
4	Bijarto	Primkop Kartika B-15	SP, SU
5	Edi Sumarjoko	Primkopau I AAU	SP, Jasa, SU
6	Suwanto	Primko Paskhas-AU	SP, SU
7	Lyana	KPRI Mekanika UGM	SP
8	Ninik Ruwyanti	KPRI Bhumi Sejahtera	SP
9	Indung Panca Putra	KPRI AMRTAGHATA	SP, SU
10	Iriany	KSU Swaloka	SP, SU, Jasa
11	M. Nur Hidayat	KSU Tirta Makmur	SP
12	Teguh Budiyaanta	KPRI Tekad Manunggal (TeMan)	SP
13	Arfiana	Kopma UGM	SU
14	Bambang Susanto	Puskopsyah Formes	SP
15	Sarekat	Kopus Medika	SP
16	Sakir	Kopkarecy Yakkum	SP
17	Nining Retnowati	KPRI "Megar"	SP
18	Sugiyono	KSU Bina Mitra Insani	SP
19	Sandimin	KSU Mitra Rejodani	SP
20	Agus Suprpto	KPRI Eka Karya	SP
21	Isroji	KSP Bakoh Bagus Slamet	SP
22	H. Sahudi BA	KPRI Mekar Gamping	SP
23	Muhammad Asngat, S.Sos.	KSP Amanah Rizky	SP
24	Sri Suryaningsih, S.Pd.	KPRI Dwijasiswa Karya (Dwi Siska)	SP
25	Unang Suryana, S.Kep.	Prusi RSJ Grhasia	SP
26	Tukidjo K.	KSU Merapi Jaya	SU
27	Widyono, S.Sos.	KSU Lansia	SU

28	Endar Heru Purnawan, S.E.	KSU Purnakaryawan Pertamina (Kopana)	Jasa
29	J. Sukirdi BBA	Anugerah Agung (Kopana)	SP
30	Sudarno	KSU BMT Citra Buana Syari'ah	SP
31	Sri Fariyanti	KPRI Efkaagama	SP
32	Jumadi	Koperasi Ngudi Makmur	SP
33	Widodo, S.H.	PKPRI Kabupaten Sleman	SP
34	Siti Nurjanah	Kopma UNY	SU
35	Hendrik Retno Giantoro	BMT SMART	SP
36	Sartiman	Koperasi Karyawan PT Medarindotek	SP
37	Zainal Abidin	KSU BMT Bina Sejahtera	SP
38	Faridiantoro BB	Primer Koperasi Kartika B-10 Medari	SP, SU
39	Anas Mubakkir, S.S.	KPRI Pesona	SP
40	Puti Sudarwanti	KPRI Poltekkes Yogyakarta	SP

Lampiran 2

Instrumen Penelitian

Petunjuk: Lengkapi pertanyaan isian dengan mengisi titik-titik yang tersedia dan untuk pertanyaan pilihan dengan melingkari pilihan jawaban yang sesuai

A. KARAKTERISTIK UMUM RESPONDEN

1. Nama :
2. Alamat :
.....
.....
3. Jenis Kelamin : (1) Laki-laki (2) Perempuan
4. Umur :
5. Pendidikan Tertinggi: (1) Tidak lulus SD (2) SD (3) SMP
(4) SMA/SMK (5) D-1/D-2/D-3
(6) S-1 (7) Lainnya:.....
6. Status Pernikahan : (1) Menikah (2) Belum menikah
(3) Janda/Duda
7. Jabatan di Koperasi :
8. Tahun Bapak/Ibu tergabung dalam koperasi:
9. No Telepon Responden :

B. KARAKTERISTIK UMUM KOPERASI

1. Nama Koperasi :
2. Bidang Usaha Koperasi :
3. Alamat Koperasi :
4. Nama Ketua Koperasi :
5. Tahun Berdirinya Koperasi :
6. Nomor Badan Hukum :
7. Jumlah Anggota Koperasi pada saat awal berdiri :
8. Jumlah Anggota Koperasi saat ini :

9. No Telepon Koperasi :

C. KARAKTERISTIK DANA PINJAMAN MODAL DARI KP3M

1. Besarnya pinjaman yang diterima Koperasi:
Rp.....
2. Apakah jumlah pinjaman tersebut mencukupi ?
(1). YA (2). TIDAK
3. Pinjaman DPM Koperasi gunakan untuk:
(1). Menambah modal kerja (2). Membeli asset
(3). Lainnya
4. Sudah berapa kali Koperasi memperoleh DPM dari KP3M? Jawab: kali
5. Apakah masa tenggang (*grace period*) tersebut cukup layak dan memungkinkan Koperasi mampu membayar angsuran dengan menggunakan keuntungan usaha?
(1) YA (2). TIDAK
6. Lama periode pinjaman yang dilakukan Koperasi: ..(Hari/Minggu/Bulan)
7. Periode pembayaran angsuran pinjaman:
(1) Harian (3) Bulanan
(2) Mingguan (4) Lainnya
8. Besarnya angsuran yang Koperasi bayarkan per periode: Rp.....
9. Jumlah angsuran **yang harus** Koperasi lakukan:kali
10. Menurut Koperasi besar angsuran yang dibayarkan:
(1) Ringan (2) sesuai dengan kemampuan (3) berat
11. Jumlah angsuran **yang sudah** Koperasi lakukan:kali
12. Apakah Koperasi membayar angsuran pinjaman tepat waktu pada KP3M?
(1) YA (2) TIDAK
13. Bila menjawab “**TIDAK**”, jelaskan apa alasannya:
.....
.....
.....

14. Apakah pinjaman DPM ini mempersyaratkan adanya agunan?
(1) YA (2) TIDAK
15. Bila menjawab “YA”, jenis/bentuk agunan apa yang Koperasi gunakan
:.....
16. Apakah kontribusi (bunga) yang harus Koperasi bayarkan terlalu tinggi?
(1) YA (2) TIDAK
17. Jika menjawab “YA”, menurut Koperasi berapa kontribusi (bunga) yang sesuai dengan hasil usaha Koperasi? Jawab: % per
18. Apakah Koperasi juga memperoleh pinjaman dari lembaga selain KP3M
(1) YA (2) TIDAK

Jika menjawab “Ya”

- a. Nama lembaga lain pemberi kredit:
 - b. Berapa kontribusi (bunga) yang Koperasi bayarkan:% per
 - c. Bagaimanakah perbandingan antara DPM dengan pinjaman dari lembaga lain.....% DPM :% lembaga lain
19. Pengeluaran lain yang Koperasi lakukan dengan menggunakan DPM yang dapat menghalangi/mengganggu pemanfaatan pinjaman Koperasi untuk tujuan produktif: (jawaban bisa lebih dari satu)
(1) Tidak ada
(2) Pengeluaran untuk kebutuhan sosial kemasyarakatan (CSR, membantu anggota koperasi, dll)
(3) Membayar utang
(4) Lainnya:.....

D. PERBANDINGAN KARAKTERISTIK USAHA SEBELUM DAN SETELAH MENDAPAT DPM DARI KP3M

No.	Indikator	Sebelum Mendapat DPM	Setelah Mendapat DPM
1	Volume usaha/.....	Rp.	Rp.
2	Jumlah tenaga kerja		
3	Jumlah anggota		
4	SHU	Rp.	Rp.
5	Nilai asset yang dimiliki	Rp.	Rp.
6	Modal koperasi	Rp.	Rp.

E. INFORMASI TERKAIT DPM dan KP3M

- Dari mana Koperasi memperoleh informasi mengenai DPM dari KP3M?
 - Teman / tetangga
 - Staff KP3M
 - Leaflet / selebaran / buletin dari KP3M / Pemda Sleman
 - Pengumuman dari media massa (misalnya radio, tv, surat kabar)
 - Lainnya:.....
- Sebelum Koperasi memperoleh DPM apakah ada petugas dari instansi terkait yang melakukan survey kelayakan usaha Koperasi?
 - YA
 - TIDAK
- Sebelum Koperasi memperoleh DPM apakah ada petugas dari KP3M yang melakukan verifikasi atas hasil survey kelayakan usaha Koperasi?
 - YA
 - TIDAK
- Setelah Koperasi memperoleh DPM apakah ada petugas dari instansi terkait yang secara kotinyu memantau usaha Koperasi?
 - YA (..... kali /tahun)
 - TIDAK
- Apakah KP3M memberikan bantuan selain berbentuk DPM kepada Koperasi?
 - YA
 - TIDAK

6. Jika “YA” apa bentuk layanan yang diberikan?
- (1). Konsultasi Usaha (2). Pelatihan Manajemen Usaha
 (3). Bantuan Pemasaran (4). Pendampingan Usaha
 (5). Lainnya:
7. Berkaitan dengan pengelolaan usaha Koperasi, layanan apakah yang sebenarnya Koperasi perlukan?
- Jawab:
8. Untuk Koperasi yang pernah tidak bisa membayar angsuran tepat waktu; apakah ada petugas dari KP3M yang menanyakan/mencari tahu penyebabnya?
- (1). YA (2). TIDAK
9. Untuk Koperasi yang bisa membayar angsuran tepat waktu, apa bentuk penghargaan dari KP3M yang diberikan kepada Koperasi?
- Jawab:
10. Untuk Koperasi yang bisa membayar angsuran tepat waktu, apa bentuk penghargaan yang sebenarnya Koperasi inginkan?
- Jawab:

F. PERSEPSI RESPONDEN MENGENAI DPM DAN KEMANFAATAN DPM

Berikan penilaian mengenai pernyataan pada tabel berikut dengan memberi tanda centang (V) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia!

- (1). Sangat Setuju [SS]; (2). Setuju [S],
(3). Tidak Setuju [TS], (4). Sangat Tidak Setuju [STS]

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Pinjaman DPM diberikan tepat di saat koperasi membutuhkan tambahan modal				
2	Untuk usaha koperasi, kontribusi pinjaman yang harus koperasi bayar terlalu tinggi				
3	Untuk usaha koperasi, jumlah pinjaman DPM yang dicairkan terlalu kecil sehingga tidak cukup bermakna sebagai investasi				
4	Untuk usaha koperasi, jangka waktu pembayaran pinjaman terlalu pendek untuk dapat menghasilkan keuntungan				
5	Koperasi membayar angsuran pinjaman DPM dengan menggunakan hasil/keuntungan usaha				
6	Koperasi membayar angsuran pinjaman DPM dari sumber lain (bukan hasil usaha)				
7	Pinjaman DPM meningkatkan kinerja usaha koperasi				
8	Usaha koperasi mengalami perkembangan semenjak menerima pinjaman DPM				
9	Modal koperasi bertambah sebagai hasil pinjaman DPM yang diperoleh.				
10	Koperasi mampu membayar angsuran tepat waktu.				
11	Menurut saya pinjaman DPM telah berperan/membantu kesuksesan usaha koperasi				
12	Menurut saya pinjaman DPM telah berperan/membantu peningkatan kesejahteraan anggota koperasi				

13	Bila KP3M menarik pinjaman DPM maka koperasi masih mampu menopang usahanya sendiri				
14	Secara umum pinjaman DPM bermanfaat untuk koperasi				

G. PERSEPSI RESPONDEN MENGENAI PROSES ADMINISTRATIF DPM

Berikan penilaian mengenai pernyataan pada tabel berikut dengan memberi tanda centang (V) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia!

- (1). Sangat Setuju [SS]; (2). Setuju [S],
 (3). Tidak Setuju [TS], (4). Sangat Tidak Setuju [STS]

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Informasi mengenai DPM melalui KP3M mudah diperoleh				
2	Semua aturan yang berlaku terkait pinjaman DPM melalui KP3M mudah dipahami				
3	Prosedur pengajuan pinjaman DPM melalui KP3M berbelit-belit				
4	Keputusan KP3M dalam pemberian pinjaman DPM sesuai dengan hasil survey kelayakan usaha				
5	Proses pencairan dana pinjaman yang sudah disetujui mudah dilakukan				
6	Agar DPM yang disalurkan efektif, KP3M perlu melakukan pendampingan usaha bagi pihak penerima				
7	Pembinaan, pendampingan dan pemantauan yang dilakukan KP3M bermanfaat bagi perkembangan usaha				
8	Agar DPM yang disalurkan efektif peminjam perlu membuat laporan penggunaan DPM dan perkembangan usahanya secara berkala kepada KP3M				

9	Pembuatan laporan DPM dan perkembangan usaha secara berkala kepada KP3M sangat merepotkan				
10	Agar DPM yang disalurkan efektif, KP3M perlu memberika sanksi kepada pihak penerima yang tidak tepat waktu membayar angsuran				
11	Sanksi yang selama ini berlaku bila peminjam terlambat membayar angsuran terlalu berat				
12	Penghargaan yang diberikan KP3M bila Koperasi membayar angsuran tepat waktu mendorong Koperasi untuk lebih patuh membayar angsuran				

H. Sebagai penerima pinjaman DPM, mohon Bapak/Ibu selaku perwakilan dari koperasi bisa memberikan komentar mengenai kesulitan dalam pengelolaan pinjaman DPM atau usulan/saran berkaitan dengan program pemberian pinjaman DPM untuk perbaikan program ini ke depan.

1. Kesulitan dalam pengelolaan DPM (bisa lebih dari satu) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Saran (bisa lebih dari satu) :

.....

.....

.....

.....

.....

Lampiran 3
Hasil Penelitian
Persepsi Responden Mengenai DPM dan Kemanfaatan DPM

No.	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14
1	4	2	2	2	3	2	4	4	3	4	4	3	2	4
2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	4	3
4	4	2	1	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3
5	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	2	3
6	3	2	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3
7	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
8	4	2	2	2	3	2	4	3	3	4	3	3	3	4
9	4	1	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
10	4	3	3	3	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3
11	4	2	4	3	3	2	4	3	3	2	3	3	2	3
12	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
13	3	4	3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3
14	3	4	2	3	4	2	4	4	3	3	4	4	1	3
15	4	4	2	4	3	1	4	3	4	4	3	3	4	3
16	4	4	3	4	3	1	4	4	4	4	4	4	2	4
17	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
18	4	2	2	3	4	1	4	4	4	4	4	4	2	4
19	3	3	3	3	2	2	3	2	2	4	2	3	3	3
20	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
21	2	4	4	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
22	3	2	2	3	3	2	4	4	3	4	4	4	2	4
23	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4
24	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4
25	4	2	2	2	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4
26	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
27	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3
28	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
29	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
30	4	2	2	3	3	2	4	4	4	4	4	3	2	4
31	3	3	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3
32	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
33	4	1	4	4	3	2	4	4	3	3	4	4	3	4
34	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3

35	4	2	2	2	3	2	3	3	3	4	3	3	2	3
36	4	2	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	2	4
37	4	2	3	3	3	2	4	3	3	4	4	3	3	4
38	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	3
39	4	2	3	2	4	2	3	3	4	3	3	3	3	4
40	3	3	2	3	4	2	4	3	3	4	4	3	3	4

Persepsi Responden Mengenai Proses Administrasi DPM

No.	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12
1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	4
2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3
3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	4	2	3
4	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3
5	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	2	4
6	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3
7	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	4
8	4	3	1	3	3	3	3	3	2	3	2	3
9	3	3	1	4	4	3	3	2	3	3	2	4
10	3	3	2	4	4	4	4	4	2	4	2	4
11	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3
12	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3
13	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	2	4
14	3	3	3	3	3	4	4	3	2	4	2	4
15	3	3	2	3	3	2	2	2	4	4	2	4
16	4	4	1	4	4	4	4	4	2	4	3	4
17	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3
18	3	3	1	3	3	3	3	3	2	4	2	4
19	4	4	2	3	3	4	3	2	3	3	2	2
20	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3
21	3	2	4	3	3	3	2	1	4	3	3	4
22	3	3	2	4	4	3	3	4	4	3	2	2
23	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4
24	3	3	2	3	3	4	4	3	2	4	1	4
25	3	3	2	3	3	4	4	4	2	3	3	3
26	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	2	4
27	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3
28	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3
29	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3
30	3	3	2	2	4	4	4	4	2	3	2	3

31	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3
32	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3
33	3	3	2	3	3	4	3	3	2	3	2	3
34	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3
35	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3
36	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	4
37	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	2	4
38	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4
39	3	4	2	3	3	4	3	3	2	3	2	3
40	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3

Perubahan Volume Usaha

No.	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Pertambahan (Rp)	Rata-rata Sebelum (Rp)	Rata-rata Sesudah (Rp)	Prosentase
1	0	0	0	1.466.623.518	1.722.833.560	0%
2	200.218.909	300.218.909	100.000.000	1.466.623.518	1.722.833.560	50%
3	529.933.500	864.900.000	334.966.500	1.466.623.518	1.722.833.560	63%
4	230.555.010	283.721.410	53.166.400	1.466.623.518	1.722.833.560	23%
5	11.264.243.350	11.442.685.720	178.442.370	1.466.623.518	1.722.833.560	2%
6	0	0	0	1.466.623.518	1.722.833.560	0%
7	80.696.300	180.711.514	100.015.214	1.466.623.518	1.722.833.560	124%
8	108.763.018	117.110.248	8.347.230	1.466.623.518	1.722.833.560	8%
9	2.146.633.321	2.704.695.321	558.062.000	1.466.623.518	1.722.833.560	26%
10	161.515.994	301.807.504	140.291.510	1.466.623.518	1.722.833.560	87%
11	300.000.000	480.000.000	180.000.000	1.466.623.518	1.722.833.560	60%
12	720.820.000	842.470.750	121.650.750	1.466.623.518	1.722.833.560	17%
13	14.000.000.000	16.000.000.000	2.000.000.000	1.466.623.518	1.722.833.560	14%
14	515.462.000	1.145.513.879	630.051.879	1.466.623.518	1.722.833.560	122%
15	93.000.000	167.000.000	74.000.000	1.466.623.518	1.722.833.560	80%
16	400.000.000	600.000.000	200.000.000	1.466.623.518	1.722.833.560	50%
17	708.000.000	708.000.000	0	1.466.623.518	1.722.833.560	0%
18	600.000.000	800.000.000	200.000.000	1.466.623.518	1.722.833.560	33%
19	1.976.850.000	1.976.850.000	0	1.466.623.518	1.722.833.560	0%
20	1.060.679.500	1.263.831.000	203.151.500	1.466.623.518	1.722.833.560	19%
21	250.000.000	350.000.000	100.000.000	1.466.623.518	1.722.833.560	40%
22	318.132.390	372.114.420	53.982.030	1.466.623.518	1.722.833.560	17%
23	88.676.250	660.052.265	571.376.015	1.466.623.518	1.722.833.560	644%
24	101.043.968	106.671.433	5.627.465	1.466.623.518	1.722.833.560	6%

25	429.539.359	880.438.693	450.899.334	1.466.623.518	1.722.833.560	105%
26	93.534.400	120.563.800	27.029.400	1.466.623.518	1.722.833.560	29%
27	4.675.248.460	5.692.535.884	1.017.287.424	1.466.623.518	1.722.833.560	22%
28	944.242.000	975.872.000	31.630.000	1.466.623.518	1.722.833.560	3%
29	1.257.500.000	1.139.670.000	(117.830.000)	1.466.623.518	1.722.833.560	-9%
30	1.402.463.900	1.455.422.100	52.958.200	1.466.623.518	1.722.833.560	4%
31	1.656.527.000	2.198.003.900	541.476.900	1.466.623.518	1.722.833.560	33%
32	433.500.000	525.000.000	91.500.000	1.466.623.518	1.722.833.560	21%
33	270.000.000	305.000.000	35.000.000	1.466.623.518	1.722.833.560	13%
34	7.047.293.278	8.409.055.070	1.361.761.792	1.466.623.518	1.722.833.560	19%
35	189.038.920	447.902.900	258.863.980	1.466.623.518	1.722.833.560	137%
36	326.033.500	431.056.800	105.023.300	1.466.623.518	1.722.833.560	32%
37	2.455.276.450	2.798.620.850	343.344.400	1.466.623.518	1.722.833.560	14%
38	642.428.650	738.616.050	96.187.400	1.466.623.518	1.722.833.560	15%
39	0	0	0	1.466.623.518	1.722.833.560	0%
40	987.091.278	1.127.229.987	140.138.709	1.466.623.518	1.722.833.560	14%

Perubahan Tenaga Kerja

No.	Sebelum	Sesudah	Pertambahan	Rata-rata Sebelum	Rata-rata Sesudah	Prosentase
1	0	0	0	8,2	8,725	0%
2	0	0	0	8,2	8,725	0%
3	2	2	0	8,2	8,725	0%
4	6	6	0	8,2	8,725	0%
5	25	25	0	8,2	8,725	0%
6	11	11	0	8,2	8,725	0%
7	2	2	0	8,2	8,725	0%
8	2	2	0	8,2	8,725	0%
9	2	2	0	8,2	8,725	0%
10	1	3	2	8,2	8,725	200%
11	0	0	0	8,2	8,725	0%
12	1	1	0	8,2	8,725	0%
13	84	84	0	8,2	8,725	0%
14	1	2	1	8,2	8,725	100%
15	0	0	0	8,2	8,725	0%
16	0	0	0	8,2	8,725	0%
17	4	4	0	8,2	8,725	0%
18	20	22	2	8,2	8,725	10%
19	3	3	0	8,2	8,725	0%
20	0	0	0	8,2	8,725	0%
21	35	47	12	8,2	8,725	0%
22	0	0	0	8,2	8,725	0%
23	5	5	0	8,2	8,725	0%
24	1	1	0	8,2	8,725	0%
25	1	1	0	8,2	8,725	0%
26	10	12	2	8,2	8,725	20%
27	0	0	0	8,2	8,725	0%
28	7	7	0	8,2	8,725	0%
29	4	4	0	8,2	8,725	0%
30	9	13	4	8,2	8,725	44%
31	3	3	0	8,2	8,725	0%
32	6	6	0	8,2	8,725	0%
33	3	3	0	8,2	8,725	0%
34	51	49	-2	8,2	8,725	-4%
35	4	4	0	8,2	8,725	0%
36	0	0	0	8,2	8,725	0%

37	12	12	0	8,2	8,725	0%
38	5	5	0	8,2	8,725	0%
39	7	7	0	8,2	8,725	0%
40	1	1	0	8,2	8,725	0%

Perubahan Jumlah Anggota

No.	Sebelum	Sesudah	Pertambahan	Rata-rata Sebelum	Rata-rata Sesudah	Prosentase
1	187	187	0	292	336	0%
2	65	63	-2	292	336	-3%
3	132	132	0	292	336	0%
4	56	56	0	292	336	0%
5	935	935	0	292	336	0%
6	108	108	0	292	336	0%
7	75	82	7	292	336	9%
8	157	162	5	292	336	3%
9	379	350	-29	292	336	-8%
10	136	211	75	292	336	55%
11	90	113	23	292	336	26%
12	104	104	0	292	336	0%
13	1.118	1.203	85	292	336	8%
14	47	48	1	292	336	2%
15	40	48	8	292	336	20%
16	60	60	0	292	336	0%
17	146	146	0	292	336	0%
18	1.400	1.630	230	292	336	16%
19	379	379	0	292	336	0%
20	121	124	3	292	336	2%
21	54	54	0	292	336	0%
22	407	407	0	292	336	0%
23	56	223	167	292	336	298%
24	89	89	0	292	336	0%
25	241	279	38	292	336	16%
26	124	134	10	292	336	8%
27	126	126	0	292	336	0%
28	300	345	45	292	336	15%
29	320	294	-26	292	336	-8%
30	72	106	34	292	336	47%
31	513	571	58	292	336	11%

32	550	699	149	292	336	27%
33	53	53	0	292	336	0%
34	2.190	3.067	877	292	336	40%
35	60	60	0	292	336	0%
36	0	0	0	292	336	0%
37	98	113	15	292	336	15%
38	369	366	-3	292	336	-1%
39	104	104	0	292	336	0%
40	227	227	0	292	336	0%

Perubahan SHU

No.	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Pertambahan (Rp)	Rata-rata Sebelum (Rp)	Rata-rata Sesudah (Rp)	Prose ntase
1	80.461.400	69.112.900	(11.348.500)	59.502.383	67.004.666	-14%
2	5.000.000	5.000.000	0	59.502.383	67.004.666	0%
3	49.230.883	68.371.320	19.140.437	59.502.383	67.004.666	39%
4	20.200.000	32.184.802	11.984.802	59.502.383	67.004.666	59%
5	41.498.077	42.036.629	538.552	59.502.383	67.004.666	1%
6	80.212.147	83.579.105	3.366.958	59.502.383	67.004.666	4%
7	12.397.600	17.699.450	5.301.850	59.502.383	67.004.666	43%
8	25.584.767	26.071.664	486.897	59.502.383	67.004.666	2%
9	423.047.900	378.576.000	(44.471.900)	59.502.383	67.004.666	-11%
10	89.432.453	115.379.846	25.947.393	59.502.383	67.004.666	29%
11	60.000.000	96.000.000	36.000.000	59.502.383	67.004.666	60%
12	18.514.577	12.349.525	(6.165.052)	59.502.383	67.004.666	-33%
13	276.000.000	294.000.000	18.000.000	59.502.383	67.004.666	7%
14	7.179.277	7.784.990	605.713	59.502.383	67.004.666	8%
15	11.434.000	21.721.000	10.287.000	59.502.383	67.004.666	90%
16	30.000.000	40.000.000	10.000.000		67.004.666	33%

				59.502.383		
17	71.000.000	71.000.000	0	59.502.383	67.004.666	0%
18	5.000.000	6.000.000	1.000.000	59.502.383	67.004.666	20%
19	20.193.600	20.193.600	0	59.502.383	67.004.666	0%
20	38.565.186	12.386.214	(26.178.972)	59.502.383	67.004.666	-68%
21	16.000.000	18.250.000	2.250.000	59.502.383	67.004.666	14%
22	28.000.000	33.000.000	5.000.000	59.502.383	67.004.666	18%
23	1.510.172	37.994.645	36.484.473	59.502.383	67.004.666	2416%
24	4.332.882	4.315.647	(17.235)	59.502.383	67.004.666	0%
25	8.651.276	8.274.875	(376.401)	59.502.383	67.004.666	-4%
26	51.067.733	69.284.271	18.216.538	59.502.383	67.004.666	36%
27	75.106.346	64.269.204	(10.837.142)	59.502.383	67.004.666	-14%
28	127.101.900	169.692.000	42.590.100	59.502.383	67.004.666	34%
29	36.479.337	38.467.511	1.988.174	59.502.383	67.004.666	5%
30	45.000.000	48.000.000	3.000.000	59.502.383	67.004.666	7%
31	56.950.547	71.424.361	14.473.814	59.502.383	67.004.666	25%
32	8.130.000	11.525.000	3.395.000	59.502.383	67.004.666	42%
33	10.602.957	11.750.000	1.147.043	59.502.383	67.004.666	11%
34	200.745.310	284.867.755	84.122.445	59.502.383	67.004.666	42%
35	13.885.950	23.203.433	9.317.483	59.502.383	67.004.666	67%
36	56.906.667	62.838.499	5.931.832	59.502.383	67.004.666	10%
37	62.876.628	68.565.891	5.689.263	9.502.383	67.004.666	9%
38	152.780.740	135.026.559	(17.754.181)	59.502.383	67.004.666	-12%
39	20.300.000	20.300.000	0	59.502.383	67.004.666	0%
40	38.715.007	79.689.954	40.974.947	59.502.383	67.004.666	106%

Perubahan Nilai Asset

No.	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Pertambahan (Rp)	Rata-rata Sebelum (Rp)	Rata-rata Sesudah (Rp)	Prosentase
1	871.812.430	871.812.430	0	1.019.004.088	1.270.516.091	0%
2	324.491.153	424.491.153	100.000.000	1.019.004.088	1.270.516.091	31%
3	355.211.733	808.848.367	453.636.634	1.019.004.088	1.270.516.091	128%
4	80.630.721	94.652.966	14.022.245	1.019.004.088	1.270.516.091	17%
5	5.022.343.788	5.322.343.788	300.000.000	1.019.004.088	1.270.516.091	6%
6	0	0	0	1.019.004.088	1.270.516.091	0%
7	0	0	0	1.019.004.088	1.270.516.091	0%
8	526.736.503	613.613.040	86.876.537	1.019.004.088	1.270.516.091	16%
9	0	0	0	1.019.004.088	1.270.516.091	0%
10	1.241.672.066	2.366.598.702	1.124.926.636	1.019.004.088	1.270.516.091	91%
11	5.000.000	5.000.000	0	1.019.004.088	1.270.516.091	0%
12	525.441.345	600.334.267	74.892.922	1.019.004.088	1.270.516.091	14%
13	2.600.000.000	3.100.000.000	500.000.000	1.019.004.088	1.270.516.091	19%
14	1.126.391.846	1.442.059.182	315.667.336	1.019.004.088	1.270.516.091	28%
15	108.000.000	154.000.000	46.000.000	1.019.004.088	1.270.516.091	43%
16	300.000.000	500.000.000	200.000.000	1.019.004.088	1.270.516.091	67%
17	0	0	0	1.019.004.088	1.270.516.091	0%
18	700.000.000	900.000.000	200.000.000	1.019.004.088	1.270.516.091	29%
19	2.451.474.675	2.451.474.675	0	1.019.004.088	1.270.516.091	0%
20	1.287.217.793	1.601.836.415	314.618.622	1.019.004.088	1.270.516.091	24%
21	45.000.000	52.000.000	7.000.000	1.019.004.088	1.270.516.091	16%
22	1.714.915.905	2.163.513.181	448.597.276	1.019.004.088	1.270.516.091	26%
23	109.308.788	792.751.624	683.442.836	1.019.004.088	1.270.516.091	625%

24	569.120.927	805.546.681	236.425.754	1.019.004.088	1.270.516.091	42%
25	485.603.707	953.084.441	467.480.734	1.019.004.088	1.270.516.091	96%
26	629.611.297	779.611.297	150.000.000	1.019.004.088	1.270.516.091	24%
27	524.906.817	830.856.878	305.950.061	1.019.004.088	1.270.516.091	58%
28	406.608.990	461.779.890	55.170.900	1.019.004.088	1.270.516.091	14%
29	1.094.219.963	1.024.000.178	(70.219.785)	1.019.004.088	1.270.516.091	-6%
30	2.620.123.981	2.854.519.650	234.395.669	1.019.004.088	1.270.516.091	9%
31	1.656.527.000	2.198.003.900	541.476.900	1.019.004.088	1.270.516.091	33%
32	991.199.900	104.389.523	(886.810.377)	1.019.004.088	1.270.516.091	-89%
33	1.274.859.778	2.848.040.780	1.573.181.002	1.019.004.088	1.270.516.091	123%
34	1.531.167.716	1.822.353.636	291.185.920	1.019.004.088	1.270.516.091	19%
35	203.037.420	463.461.581	260.424.161	1.019.004.088	1.270.516.091	128%
36	1.230.755.820	1.881.902.176	651.146.356	1.019.004.088	1.270.516.091	53%
37	3.498.856.885	4.279.305.081	780.448.196	1.019.004.088	1.270.516.091	22%
38	3.068.456.572	3.262.094.138	193.637.566	1.019.004.088	1.270.516.091	6%
39	576.677.612	576.677.612	0	1.019.004.088	1.270.516.091	0%
40	1.002.780.385	1.409.686.393	406.906.008	1.019.004.088	1.270.516.091	41%

Perubahan Modal

No.	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Pertambahan (Rp)	Rata-rata Sebelum (Rp)	Rata-rata Sesudah (Rp)	Prosentase
1	544.072.648	593.942.665	49.870.017	533.123.926	633.434.965	9%
2	324.491.153	424.491.153	100.000.000	533.123.926	633.434.965	31%
3	114.094.946	140.909.781	26.814.835	533.123.926	633.434.965	24%
4	308.658.320	408.658.320	100.000.000	533.123.926	633.434.965	32%
5	2.296.119.602	2.296.119.602	0	533.123.926	633.434.965	0%
6	618.327.655	683.505.682	65.178.027	533.123.926	633.434.965	11%
7	40.000.000	60.000.000	20.000.000	533.123.926	633.434.965	50%
8	451.151.736	567.581.376	116.429.640	533.123.926	633.434.965	26%
9	2.303.712.754	2.865.362.781	561.650.027	533.123.926	633.434.965	24%
10	30.000.000	30.000.000	0	533.123.926	633.434.965	0%
11	80.000.000	90.000.000	10.000.000	533.123.926	633.434.965	13%
12	294.449.799	301.470.206	7.020.407	533.123.926	633.434.965	2%
13	1.800.000.000	1.900.000.000	100.000.000	533.123.926	633.434.965	6%
14	356.999.245	371.629.589	14.630.344	533.123.926	633.434.965	4%
15	40.279.040	59.000.000	18.720.960	533.123.926	633.434.965	46%
16	95.000.000	100.000.000	5.000.000	533.123.926	633.434.965	5%
17	26.280.000	43.800.000	17.520.000	533.123.926	633.434.965	67%
18	350.000.000	500.000.000	150.000.000	533.123.926	633.434.965	43%
19	1.685.197.000	1.685.197.000	0	533.123.926	633.434.965	0%
20	420.091.901	474.748.611	54.656.710	533.123.926	633.434.965	13%
21	400.000.000	650.000.000	250.000.000	533.123.926	633.434.965	63%
22	1.122.552.876	1.265.850.876	143.298.000	533.123.926	633.434.965	13%

23	23.800.000	137.469.615	113.669.615	533.123.926	633.434.965	478%
24	180.523.028	205.033.316	24.510.288	533.123.926	633.434.965	14%
25	331.952.528	669.990.328	338.037.800	533.123.926	633.434.965	102%
26	634.526.914	710.377.026	75.850.112	533.123.926	633.434.965	12%
27	212.441.766	540.329.218	327.887.452	533.123.926	633.434.965	154%
28	644.153.660	704.969.969	60.816.309	533.123.926	633.434.965	9%
29	366.410.820	368.881.688	2.470.868	533.123.926	633.434.965	1%
30	202.364.382	207.393.382	5.029.000	533.123.926	633.434.965	2%
31	232.381.000	272.523.100	40.142.100	533.123.926	633.434.965	17%
32	133.088.109	151.230.009	18.141.900	533.123.926	633.434.965	14%
33	475.483.426	674.487.926	199.004.500	533.123.926	633.434.965	42%
34	706.001.485	1.028.286.507	322.285.022	533.123.926	633.434.965	46%
35	38.374.620	70.348.053	31.973.433	533.123.926	633.434.965	83%
36	429.520.343	620.130.787	190.610.444	533.123.926	633.434.965	44%
37	194.275.705	244.855.426	50.579.721	533.123.926	633.434.965	26%
38	2.487.549.404	2.860.192.261	372.642.857	533.123.926	633.434.965	15%
39	243.592.862	243.592.862	0	533.123.926	633.434.965	0%
40	87.038.327	115.039.488	28.001.161	533.123.926	633.434.965	32%